



VOLUNTARY LOCAL REVIEW (VLR)

KOTA BANDAR LAMPUNG

MEWUJUDKAN KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI KOTA
SEHAT, CERDAS, AMAN, NYAMAN DAN BERKELANJUTAN



الله اولاً مدرسة و الله
SELAMAT DATANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

2023





Sambutan Eva Dwiana

Wali Kota Bandar Lampung

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Tabik pun,

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat terus berkarya membangun Kota Bandar Lampung dari berbagai aspek kehidupan. Dalam mendukung Visi, Misi, dan Rencana Aksi Kota Bandar Lampung dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui program VLR SDGs serta sebagai kota yang progresif dan peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan, Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs memberikan arahan yang jelas bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan lestari, serta melindungi tempat yang kita tinggali. Program VLR SDGs Kota Bandar Lampung merupakan upaya nyata Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi komitmen tersebut. VLR atau *Voluntary Local Review* adalah suatu proses yang memungkinkan untuk mengukur pencapaian dalam mencapai tujuan SDGs secara berkala, serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil untuk mewujudkannya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan kolaborasi semua pihak untuk bergabung dan mendukung program VLR SDGs Kota Bandar Lampung. Dengan semangat keberlanjutan yang tinggi bersama-sama menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang inklusif, inovatif, unggul, maju dan nyaman di mana setiap warga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik serta pembangunan Kota Bandar Lampung terus meningkat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Sambutan

Iwan Gunawan, SP., MA

**Sekretaris Daerah
Kota Bandar Lampung**

**Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Tabik Pun...**

Lahirnya gagasan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari perencanaan kota yang memerlukan kematangan dan kehati-hatian dalam keberlanjutan. Kota Bandar Lampung adalah salah satu Kota di Indonesia yang berkomitmen mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan ini. Pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif yang mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, komitmen global yang terkandung dalam SDGs telah tertuang dalam program-program dan kegiatan di Kota Bandar Lampung. Tujuan-tujuan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, lembaga, dan sektor swasta. Masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih penting dari masa depan, implikasinya pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Melalui kolaborasi dan upaya bersama, kita bisa mewujudkan perubahan positif yang berdampak luas bagi kesejahteraan warga kota Bandar Lampung.

Dalam VLR SDGs Tahun 2023 ini telah tertuang komitmen Kota Bandar Lampung untuk menjaga lingkungan, memastikan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tekad dan usaha bersama, kita bisa meraih setiap target SDGs dan mewujudkan Bandar Lampung yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Sambutan

Yusman Kunang HS, S.Sos

Plt. Kepala Bappeda
Kota Bandar Lampung

(Agustus 2023)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Tabik pun.....

Kota Bandar Lampung memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan SDGs yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan inklusif untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat kita. Melalui program Voluntary Local Review (VLR) SDGs, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi pencapaian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan SDGs dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil ke depan. VLR Kota Bandar Lampung bertujuan untuk memetakan dan menganalisis kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, kesetaraan gender, dan ekonomi berkelanjutan. Saya ingin menekankan pentingnya dimensi ekonomi dan sosial dalam upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai tujuan SDGs. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks VLR SDGs, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif untuk mencapai tujuan SDGs. Pemerintah Kota Bandar Lampung percaya bahwa solusi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak.

Melalui VLR SDGs, kami berharap dapat memperkuat kerangka kerja perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Kami berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada bukti, berbasis data, dan berorientasi pada dampak. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya mengajak semua peserta untuk terlibat aktif untuk kesempurnaan VLR Kota Bandar Lampung, berbagi pengalaman, dan memberikan kontribusi yang berarti. Mari kita bersama-sama menjadikan VLR SDGs sebagai tonggak penting dalam perjalanan Kota Bandar Lampung menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Sambutan Koordinator Penyusun VLR
Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos, M.Si

**Kepala Bidang
Perekonomian dan SDA**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki komitmen dalam mendukung keberlanjutan kota. Bentuk komitmen ini diantaranya adalah dokumen VLR yang berisikan pencapaian serta gambaran holistik mengenai kemajuan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs) di Kota Bandar Lampung. VLR SDGs adalah sebuah inisiatif yang sangat penting dalam perjalanan kita menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam dokumen ini membahas tujuan utama yang meliputi penghapusan kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta penanggulangan perubahan iklim. Selanjutnya, VLR SDGs Tahun 2023 ini menegaskan komitmen Kota Bandar Lampung untuk mencapai tujuan utama SDGs, yaitu penghapusan kemiskinan. Pemerintah Bandar Lampung mengakui pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan, di mana semua warga Kota Bandar Lampung dapat menikmati akses terhadap kesempatan dan sumber daya yang setara. Melalui program VLR SDGs Tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengidentifikasi dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam program VLR SDGs Tahun 2023, telah tertuang upaya-upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam TPB 1,3,4,5,6 dan 13 melalui program-program kerja yang tersebar pada setiap perangkat daerah sebagai komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan di Kota Bandar Lampung. Semoga Dokumen VLR ini miliki kebermanfaatan baik untuk Kota Bandar Lampung dan untuk lingkungan perkotaan yang sehat menuju Kota Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan lebih baik.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Daftar Isi

01

Pendahuluan

1. Bandar Lampung dalam Angka
2. Sinergitas SDGs Bandar Lampung dalam Keselarasan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota

02

Metodologi

1. Komitmen Bandar Lampung terhadap Ketercapaian SDGs
2. Isu Prioritas Bandar Lampung

03

Nilai dan Konten Pembangunan

Kegiatan dalam mencapai Goals Isu
Prioritas SDGs Bandar Lampung

04

Kesimpulan dan Saran

Pencapaian TPB SDGs dan
Tahapan Keberlanjutan
Mendatang

Daftar isi

i	Kata Sambutan
v	Daftar Isi
vii	Daftar Gambar
viii	Daftar Tabel
ix	Daftar Grafik
x	Kata Pengantar
xi	Executive Summary
1	BAB 1 Pendahuluan
1	Latar Belakang
2	Profil Bandar Lampung
4	Bandar Lampung Dalam Angka
9	Sinergisitas SDGs
20	BAB 2 Kota Bandar Lampung Dan Komitmen Terhadap Sdgs
24	TPB 1 Tanpa Kemiskinan
31	TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Kesejahteraan
43	TPB 4 Pendidikan Yang Berkualitas
51	TPB 5 Kesetaraan Gender
59	TPB 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak
81	TPB 13 Perubahan Iklim
88	BAB 3 Nilai dan Konten Pembangunan
89	TPB 1 Tanpa Kemiskinan
93	TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Kesejahteraan
98	TPB 4 Pendidikan Yang Berkualitas
101	TPB 5 Kesetaraan Gender
104	TPB 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak
105	TPB 13 Perubahan Iklim
109	BAB 4 Kesimpulan Dan Saran
110	Kesimpulan
113	Saran

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kota Bandar Lampung	3
Gambar 1.2	Piramida penduduk berdasarkan jenis kelamin perkecamatan	5
Gambar 2.1	Presentase Balita Stunting Perkecamatan se-Kota Bandar Lampung	35
Gambar 2.2	Target upaya Kota Bandar Lampung	65
Gambar 3.1	Indeks pemberdayaan gender Tahun 2016-2020	103
Gambar 4.1	Target dan indikator pilar sosial pada perangkat daerah Kota Bandar Lampung	110
Gambar 4.2	Target dan indikator pilar lingkungan pada perangkat daerah Kota Bandar Lampung	111

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel 1.1. Penduduk per Kecamatan	4
Tabel 1.2. Indeks Pembangunan Manusia	6
Tabel 1.3. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (%) Tahun 2020-2022	7
Tabel 2.1 Jumlah penduduk miskin 2020-2022	22
Tabel 2.2 Persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung 2020-2022	24
Tabel 2.3 Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 - 2022	25
Tabel 2.3 Pemetaan Data Indikator TPB/SDGs pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung	27
Tabel 2.4 Pravelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung	36
Tabel 2.5 Stunting Kota Bandar Lampung Sampai dengan Februari 2023	38
Tabel 2.6 Pravelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung	39
Tabel 2.7 Rata-rata Suhu Udara (celcius) Tahun 2020 - 2022	82
Tabel 3.1 Indeks pembangunnan gender 2016-2020	102

Daftar Grafik

DAFTAR GRAFIK	Halaman
Grafik 1.1 Laju inflasi 2020-2023 (%)	8
Grafik 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah september 2020-2021	26
Grafik 2.2 Angka persentase capaian kinerja dengan angka partisipasi kasar	43
Grafik 2.3 Angka persentase capaian kinerja dengan angka partisipasi murni	44
Grafik 2.4 Target Pencapaian SDGs 5	56
Grafik 2.5 Target Pencapaian SDGs 6	76
Grafik 2.6 Suhu Maksimum Bulanan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 - 2023	81
Grafik 3.1 Kekerasan terhadap perempuan dan anak	103

Kata Pengantar

Peran pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangatlah besar karena sebagian besar target dan indikator dalam TPB/SDGs terkait dengan agenda pemerintah daerah. Oleh karena itu pencapaian SDGs sebagian besar ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang telah ditentukan dalam proses pembangunan daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan kepada masyarakat terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Kesemua TPB tersebut secara langsung terkait dengan masing-masing tujuan yang ada dalam SDGs.

Kota sebagai kawasan yang akan menjadi tumpuan sebagian besar populasi dunia di masa depan memerlukan komitmen yang tinggi dari pengelolanya yaitu Pemerintah Kota untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah kota-kota di dunia mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan kontribusinya yang tidak sedikit dalam agenda pembangunan berkelanjutan global saat ini yaitu TPB/SDGs. Tidak terkecuali Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk mencapai target-target dan indikator-indikator yang ditetapkan dalam TPB/SDGs. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Harapannya sebagai kota terbesar di Provinsi Lampung dan juga "pintu masuk" ke Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung akan lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan dari berbagai dimensi yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum serta tata kelola melalui komitmennya terhadap pencapaian TPB/SDGs tersebut.

Untuk mengukur langkah-langkah kongkrit yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs diperlukan suatu *tool* berupa dokumen yang up-to-date dan efektif dalam mendokumentasikan sekaligus mengkaji progres pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu disusunlah dokumen *Voluntary Local Review* (VLR) yang mengacu kepada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Dokumen VLR Kota Bandar Lampung tahun 2023 ini disusun oleh BAPPEDA Bidang Perekonomian dan SDA Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui tahapan pengumpulan data, pembahasan draft awal, dan finalisasi dokumen akhir. Dokumen VLR ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kota di Bandar Lampung sekaligus menjadi percontohan bagi pemerintah kota/kabupaten lain di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Executive Summary

Kota Bandar Lampung telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Ini selaras dengan dokumen RAD SDGs/TPB Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Komitmen dalam perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung pun ditunjukkan dengan telah diselaraskannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021- 2026 dengan tujuan dan target dalam SDGs.

Prioritas diberikan pada kegiatan-kegiatan baik yang dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian SDGs. Ini menegaskan komitmen dari Wali Kota Bandar Lampung terhadap SDGs Kota Bandar Lampung dengan tetap melalui prosedur evaluasi dan target kinerja. Dokumen VLR ini disusun untuk mendokumentasikan target SDGs dan program untuk pencapaian target tersebut di Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2023 ini. Tidak semua tujuan dalam SDGs dapat terliput progresnya, melainkan berdasarkan data indikator yang dapat dikumpulkan serta dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs tertentu. RAD SDGs Kota Bandar Lampung 2020-2024 dijadikan sebagai salah satu dasar utama dalam melihat progress dan pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung.

Dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2023 ini telah berhasil mengidentifikasi komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap sebagian target dan indikator dari 6 TPB/SDGs yaitu Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 3, 4, 5), dan Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6 , 13). Sementara untuk target dan indikator pada tujuan-tujuan yang lain belum dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini dapat diakibatkan karena kurang lengkapnya data yang didapatkan atau pun memang dikarenakan belum terakomodirnya target dan indikator dari tujuan-tujuan tersebut dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Atau memang target dan indikator yang ingin dicapai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat. Enam tujuan tersebut merupakan modal dasar untuk membuat prioritas dalam pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan telah ditemukannya keterkaitan antara target SDGs dan program kegiatannya yang ditetapkan untuk mencapainya dalam Perangkat Daerah terkait. Juga indikator dan data-data yang harus dilengkapi untuk memperoleh indikator pun sudah jelas sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi.

Latar Belakang

Kota Bandar Lampung telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Ini selaras dengan dokumen RAD SDGs/TPB Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Komitmen dalam perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung pun ditunjukkan dengan telah diselaraskannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026 dengan tujuan dan target dalam SDGs. Begitu juga dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



Visi Kota Bandar Lampung 2021 - 2026 yaitu "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat" yang tertuang pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 mendatang dengan tema pembangunan yang sangat terkait dengan SDGs yaitu: "Percepatan Pemulihian Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan".

Peraturan-peraturan daerah lainnya yang mendukung pencapaian Target SDGs di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung Tahun 2020- 2040
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 242/IV.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Implementasi Sustainable Development Goals Kota Bandar Lampung Tahun 2021
- Keputusan Walikota Nomor 698/IV.01/HK Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim (*Climate Resilient and Inclusive Cities*) Kota Bandar Lampung
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

Profil Bandar Lampung

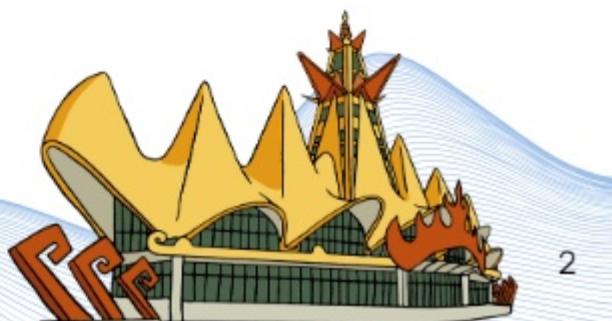
Kota Bandar Lampung atau yang dikenal sebagai Kota Tapis Berseri merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung yang terkenal sebagai gerbang masuk Pulau Sumatera. Dengan seperti itu Bandar Lampung memiliki keuntungan dari segi akses mobilisasi dan juga pariwisata. Bandar Lampung merupakan ibu kota yang pusat pemerintahannya terletak di kawasan yang secara historis dikenal sebagai Teluk Betung. Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya:

- Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Natar di Kabupaten Lampung Selatan.
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan.
- Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran.
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan.



Pada awalnya, Kota Bandar Lampung merupakan gabungan antara "kota kembar" di masa lampau yaitu Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung, yang mana kedua kota tersebut mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 kedua kota tersebut terpisah dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang-Teluk Betung.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Secara geografis, Kota Bandar Lampung ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya. Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu ialah pepadun masyarakat Lampung hanya memimiliki satu budaya yaitu penyimbang, namun ada dua tradisi yang mengkristal dan hidup dengan nilai yang kental dan demokratis yaitu saibatin.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ±18.377 Ha (183,77 km²) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 km dan luas perairan ±11,56 Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Peta administratif Kota Bandar Lampung tersaji pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung 2023



Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Bandar Lampung juga memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung dapat berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolis. Pada tahun 2015, Kota Bandar Lampung dipetakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi area metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung-Api-api. Keunggulan Kota Metropolis ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa industri, pariwisata serta pendidikan.

Bandar Lampung Dalam Angka

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung pada Tahun 2030 akan mengarah menjadi Kota Metropolitan. Saat ini dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bandar Lampung atau dikenal dengan Kota Tapis Berseri sudah memenuhi salah satu syarat menjadi kota metropolitan. Menurut Kemendagri Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar ke sembilan setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Makasar dan Batam. Pada tahun 2022-2023, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.209.937 jiwa dengan sex ratio 103,9 yang berarti terdapat sejumlah 103,9 penduduk laki-laki pada tiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.220 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.215 jiwa/km². Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2020-2022.

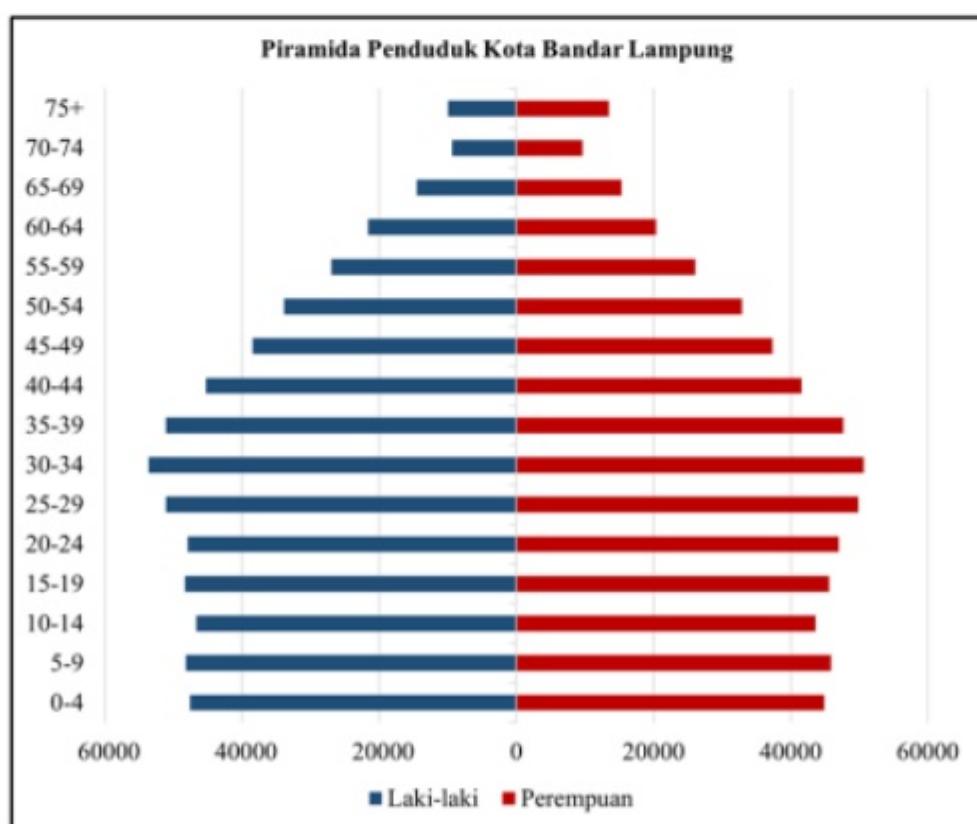
Tabel 1.1 Penduduk per Kecamatan Tahun 2020 - 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Teluk Betung Barat	41096.00	41761.00	42642.00
Teluk Betung Timur	53874.00	54746.00	55901.00
Teluk Betung Selatan	42870.00	43564.00	44483.00
Bumi Waras	63166.00	64189.00	65542.00
Panjang	80811.00	82120.00	83851.00
Tanjung Karang Timur	43076.00	43774.00	44697.00
Kedamaian	57905.00	58843.00	60084.00
Teluk Betung Utara	53552.00	54419.00	55567.00
Tanjung Karang Pusat	55925.00	56831.00	58029.00
Enggal	28649.00	29113.00	29727.00
Tanjung Karang Barat	65554.00	66616.00	6802.00
Kemiling	88574.00	90007.00	91907.00
Langkapura	43569.00	44275.00	45208.00
Kedaton	57336.00	58264.00	59493.00
Rajabasa	57589.00	58522.00	59756.00
Tanjung Senang	62168.00	63175.00	64507.00
Labuhan Ratu	52393.00	53241.00	54364.00
Sukarame	67725.00	68822.00	70273.00
Sukabumi	75870.00	77099.00	78724.00
Way Halim	74364.00	75568.00	77162.00

Sumber : BPS, 2022

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antar wilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

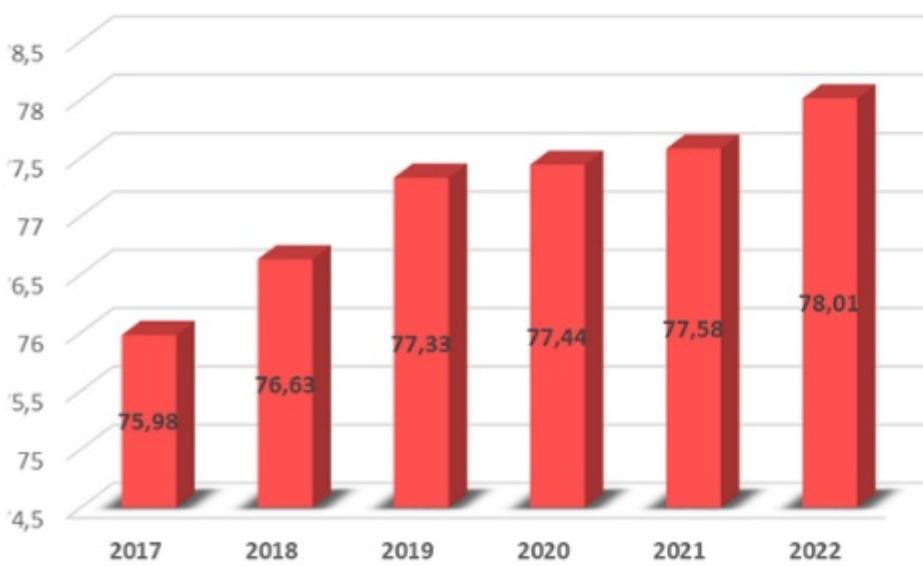
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020 - 2022



Sebagaimana terlihat pada grafik, piramida penduduk Lampung tergolong tipe ekspansif, di mana bagian bawah dan tengah lebar, lalu mengerucut di atas. Ini mengindikasikan besarnya penduduk usia muda dibandingkan yang tua. Angka kelahiran di Kota Bandar Lampung pun, cenderung lebih tinggi dibandingkan kematian. Secara spasial, Lampung Tengah merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Lampung, yakni 1,46 juta jiwa. Urutan kedua diduduki oleh Bandar Lampung dengan jumlah penduduk mencapai 1,16 juta jiwa.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mendeskripsikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu perkotaan termasuk Kota Bandar Lampung. Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung semakin meningkat pada 2021. IPM di Kota Bandar Lampung menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung yaitu sebesar 77,58 pada 2021. Kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 78,01. Peningkatan IPM Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya disebabkan adanya peningkatan di semua dimensi, mulai dari kualitas kesehatan, pendidikan hingga pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan di dukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya.



Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: BPS, 2022

Peningkatan IPM Lampung pada tahun ini terjadi di semua dimensi. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran ril per kapita per tahun meningkat 0,56% menjadi Rp10.038 juta pada 2021. Sementara itu dimensi umur panjang dan hidup sehat tercatat sebesar 70,73 tahun 2021. Kemudian pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun meningkat 0,63% menjadi 12,73 tahun pada 2021. Sementara, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,37% menjadi 8,08 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perekonomian

Daerah yang memiliki struktur sekunder seperti ini umumnya PDRBnya didominasi sektor perdagangan, hotel, restoran, dan industri pengolahan. Negara atau daerah yang memiliki struktur ekonomi tersier apabila struktur PDRBnya didominasi sektor jasa. Untuk melihat struktur perekonomian Kota Bandar Lampung maka dapat dilihat dari distribusi PDRB Kota Bandar Lampung sebagai berikut

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (%) Tahun 2020-2022

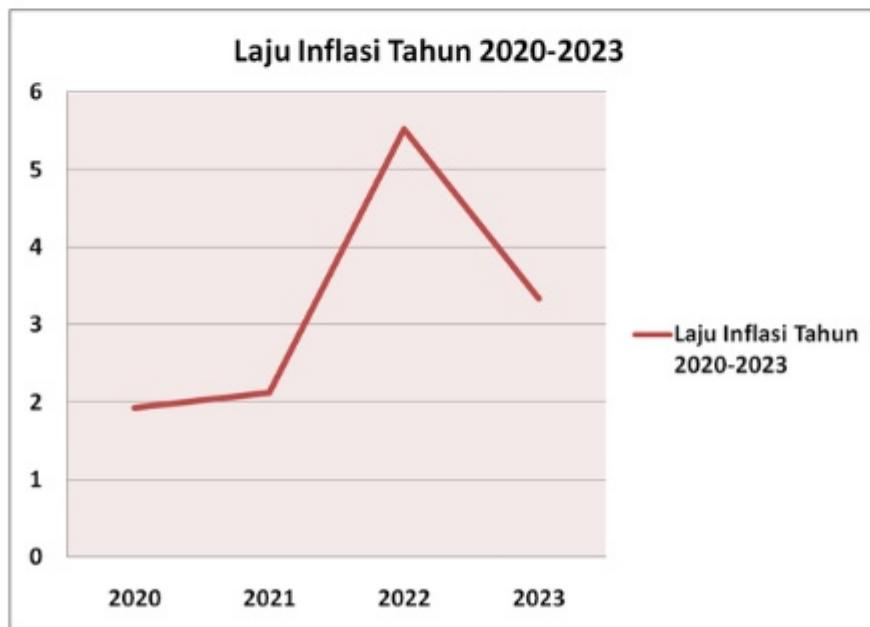
17 Kategori PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandar Lampung (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2213983.3	2280538.3	2389273.3	1494245.9	1487512.8	1497383.7
B. Pertambangan dan Penggalian	2096373.6	2040715.5	2216322.9	1130892.6	1080835.0	1110459.4
C. Industri Pengolahan	12268095.7	12973355.2	13505490.2	7682009.7	8010875.5	8079865.8
D. Pengadaan Listrik dan Gas	68530.1	71678.2	76590.2	62833.9	64200.3	66925.2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	168085.8	181284.8	190184.1	109227.4	116651.1	120640.8
F. Konstruksi	6466406.7	7021004.3	7649962.2	4420176.2	4619364.9	4741945.2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7853151.1	8487473.5	10149147.4	5345715.7	5685898.0	6253422.1
H. Transportasi dan Pergudangan	7821845.5	8085731.4	10340954.0	5054287.5	5176281.6	6066431.8
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1515813.2	1531965.6	1764418.3	882198.7	886215.4	994285.0
J. Informasi dan Komunikasi	3782840.8	3899899.7	3954487.9	3135213.7	3306931.3	3316798.7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3011415.4	3138446.7	3266332.7	1848432.8	1848793.3	1812044.3
L. Real Estate	3550975.8	3616489.7	3807133.3	2416134.7	2425760.1	2497014.7
M,N. Jasa Perusahaan	208746.9	210781.6	253049.3	131745.7	132012.3	144870.6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3482252.5	3535939.3	3590247.7	2099072.0	2140423.7	2111516.1
P. Jasa Pendidikan	2156155.7	2196503.0	2319008.4	1303221.5	1319982.7	1358262.2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1238323.0	1294522.2	1344286.3	839855.3	862531.4	861467.4
R,S,T,U. Jasa Lainnya	967141.6	959185.5	1123981.5	676939.5	666108.5	766732.7
PDRB	58870136.7	61525514.6	67940869.7	38632202.6	39830377.8	41800065.7

Sumber: BPS, 2022

Perekonomian

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian atau bisa dikatakan sebagai penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk barang atau jasa.

Grafik 1.1 Laju Inflasi Tahun 2020-2023 (%)



Sumber: BPS,2023

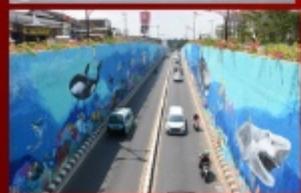
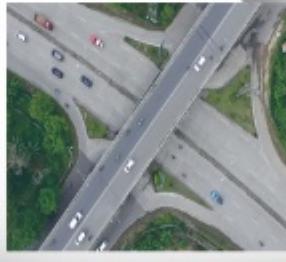
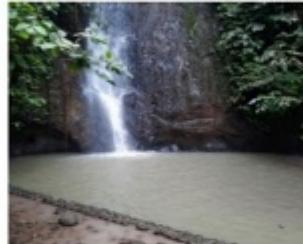
Perkembangan inflasi dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun cukup fluktuatif dengan nilai inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 5,52 % dan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,93 %. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok. Pada Tahun 2023, inflasi di Kota Bandar Lampung semakin menurun hal ini terjadi karena pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berupaya untuk melakukan percepatan transisi ekonomi melalui program - program yang dapat membantu masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung naik secara signifikan. UMKM dan IKM sangat mendorong untuk pertumbuhan ekonomi baik dari produk olahan pertanian, perikanan, peternakan maupun sektor lainnya. Upaya memfasilitasi perkembangan IKM dan UMKM di Kota Bandar Lampung dunia perbankan telah membantu pelaku UMKM dan IKM dalam mengakses permodalan. Dalam mendukung tumbuhnya ekonomi Kota Bandar Lampung peranan UMKM dan IKM menjadi bantalan ekonomi, korporatisasi membantu agar tetap tumbuh dan masyarakat tetap berproduksi, selain itu dalam bidang pertanian saat ini program digital farming agar daya tarik generasi muda dipertanian bisa dipertahankan.



Sinergisitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota

Prioritas Pembangunan

Prioritas diberikan pada kegiatan-kegiatan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian SDGs. Ini menegaskan komitmen dari Wali Kota Bandar Lampung terhadap SDGs Kota Bandar Lampung dengan tetap melalui prosedur evaluasi dan target kinerja. Begitu juga dengan pembiayaan kegiatan baik dari APBD, APBN, ataupun sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagai stimulan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam revisi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 menyelaraskan dengan RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2015 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan karena membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi untuk memperkuat perekonomian daerah, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat merupakan tahapan dalam prioritas pembangunan di Kota Bandar Lampung.



Sinergisitas SDGs

Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan.

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan sasaran nasional. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0 %. Tahun dasar September 2020: 10,1% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). Percentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional). 	<ul style="list-style-type: none"> Pada Maret 2019 Tingkat kemiskinan turun hingga 9,4%, karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Kerangka kebijakan makro pemerintah menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Kerangka kebijakan mikro dengan strategi : <ol style="list-style-type: none"> penyempurnaan kebijakan bantuan sosial Peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui : <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kawasan, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi dan sumber kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi Memfasilitasi percepatan tewujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan beras bagi keluarga miskin akibat dampak penyebaran Covid 19 di wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021, diberikan kepada 223.136 KK yang tersebar di seluruh kelurahan pada 20 Kecamatan Penyerahan bantuan korban bencana tahun 2022 Kelurahan Kangkung kecamatan bumi waras korban kebakaran. Jumlah penerima bantuan 8 orang

Sinergisitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan.

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
		2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.		

Sinergisitas SDGs

Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-2 Kehidupan sehat dan Sejahtera.

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia.	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015). Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87,91% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. 	<ul style="list-style-type: none"> Konvergensi Stunting dilakukan oleh seluruh stakeholder agar dapat mencapai target Prevalensi Stunting Nasional 14% di tahun 2024. Strategi Nasional Stunting juga menetapkan tiga prioritas, yaitu <ol style="list-style-type: none"> (1) sasaran prioritas; (2) intervensi prioritas; dan (3) lokasi prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> Lampung Sehat: Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2022, mengurangi rasio angka kematian ibu melahirkan pada saat persalinan yaitu menjadi 4 kasus, dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebanyak 15 kasus angka kematian ibu melahirkan pada saat persalinan Meningkatnya persentase persalinan di fasyankes (Fasilitas pelayanan kesehatan) menjadi 100% di Tahun 2022 Sasaran prioritas dari pencegahan stunting adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Sinergisitas SDGs

Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-4 Pendidikan Berkualitas dan Bermutu.

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, Yang terjangkau dan berkualitas. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) meningkat 32,28%. Tahun dasar 2020: 30,85% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). Meningkatnya persentase anak kelas I SD/MI/SDLB yang pemah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 7 2,7 7%. Tahun dasar 2020: 62,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, trampil, dan berkarakter Pembangunan SDM 1. Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas 2. Pendidikan dan pelatihan vokasi 3. Pendidikan tinggi 4. Iptek dan inovasi 5. Pembangunan karakter 6. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila 7. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Smart School pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten /Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen dan mendukung penuh program sekolah penggerak dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil Pancasila dan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Program GTK Kemendikbud E-layanan PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN Program profesi guru dalam jabatan Program raport guru

Sinergisitas SDGs

Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-5 Kesetaraan Gender

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang Publik dan pribadi, termasuk Perdagangan manusia dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016: 9,4% (Sumber data: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan <ul style="list-style-type: none"> a. penguatan kebijakan regulasi b. percepatan pelaksanaan PUG di kementerian /lembaga pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) c. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha d. peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politikl, jabatan publik, dan pengambilan keputusan e. peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan Berjaya: memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan Lampung Ramah Perempuan dan Anak: mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota) Anak Muda Berjaya: mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja 	<p>Program Unggulan dan prioritas Kota Bandar Lampung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pengelolaan sistem data gender dan anak • program forum anak • Aplikasi pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) "SAI BETIK" • Aplikasi puskesmas ramah anak (PUSRA) • Sekolah ramah anak (SRA) • Program pengelolaan pendidikan (SPM) • Program pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan • program peningkatan kualitas keluarga • program perlindungan perempuan • program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Sinergisitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.

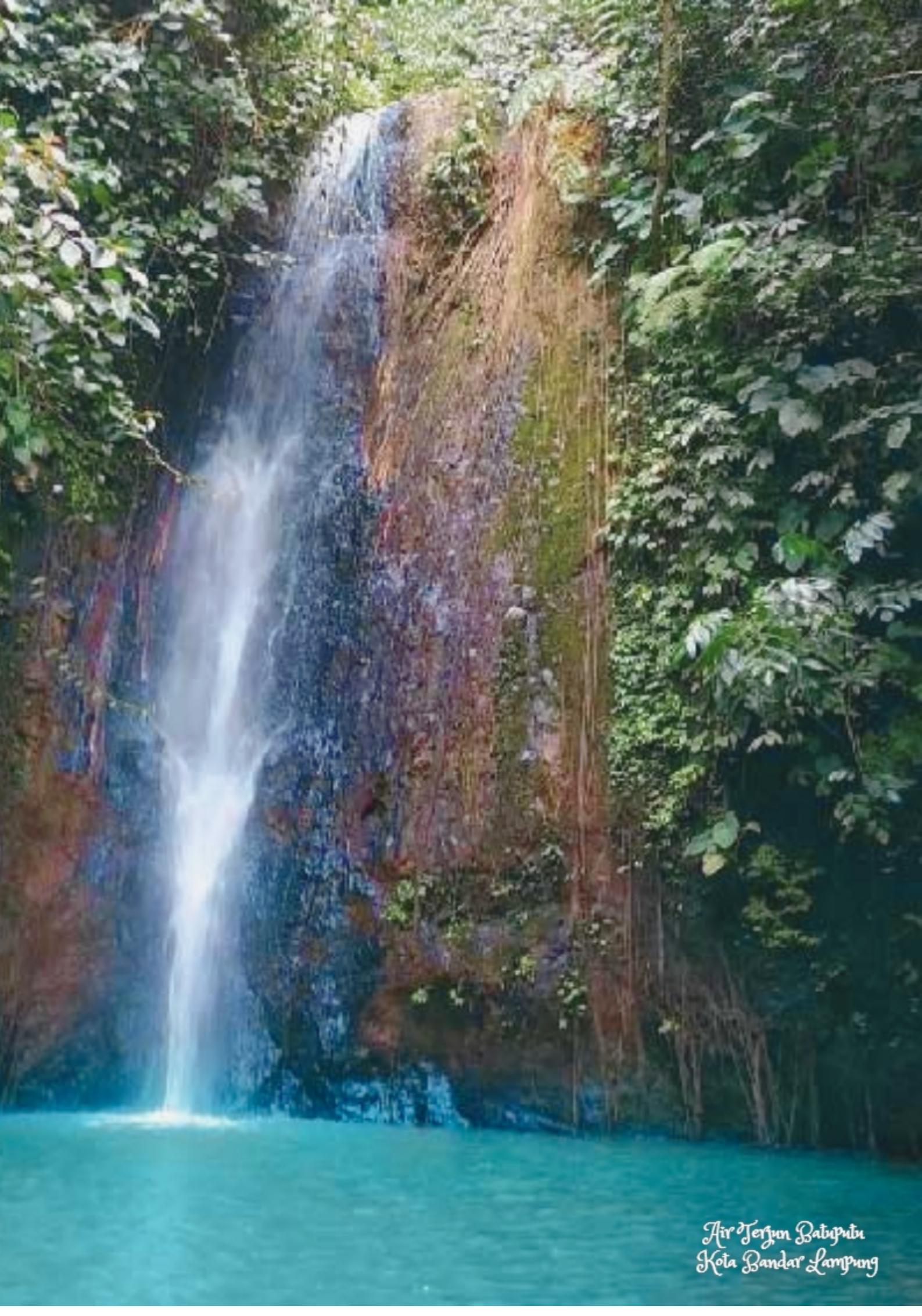
TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45% dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Tahun dasar 2020: 90,21% untuk akses air minum layak, 20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,97% untuk akses air minum aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan hrsat Statistik dan Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan Praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020: 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum Meningkatkan komitmen melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional Prioritas perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun Peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset Peningkatan minat Investasi dan kerjasama badan usaha Peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar pemukiman yang optimal Pengembangan sektor sanitasi yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> Air Limbah Domestik 90% Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak (termasuk 10% Akses Aman) Praktik BABS di Tempat Terbuka 0% RT Program perencanaan Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) 	<ul style="list-style-type: none"> Target capaian 100%, dan 15% akses aman. persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman 33,32% (data dari kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Tahun 2021) indikator belum mencapai target persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman ,termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun capaian 35,61% dari target capaian 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) Jumlah Penduduk Terlayani 373. 376 Jiwa Jumlah Kecamatan Terlayani sejumlah 18 Kecamatan Cakupan Pelayanan 34,89% Kapasitas Produksi Total 750 Liter / Detik Jumlah Total Sambungan Rumah 60.006 SR Air Limbah Domestik sebesar 95% Rumah Tangga memiliki Akses Sanitasi Layak termasuk 12% Akses Aman Praktik BABS di tempat terbuka 0%

Sinergisitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-13 Perubahan Iklim

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
<p>TPB 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumberdata: RPJMN 2020-2024). Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15% (Sumber data: RPJMN 2020-2024). 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumberdata: RPJMN 2020-2024). Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15% (Sumber data: RPJMN 2020-2024). 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim Pembangunan rendah karbon 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Program penanggulangan bencana (SPM) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi ketahanan sektor air bersih : <ol style="list-style-type: none"> peningkatan cakupan pelayanan air bersih penghematan air dan pemanfaatan kembali Strategi ketahanan sektor lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> rehabilitasi hutan dan lahan kritis pembuatan sumur resapan dan biopori pengelolaan limbah rumah tangga, pasar, dan industri secara terpadu Strategi ketahanan sektor infrasruktur <ol style="list-style-type: none"> pembangunan talut disekitar wilayah rawan longsor pembangunan dan pemeliharaan drenase terpadu pengelolaan sampah secara terpadu penataan pemukiman yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana

Sinergisitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPMJN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-7 Perubahan Iklim

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022	RPJMN	RPJMD	RPJM Kota Bandar Lampung
TPB 13 <i>Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. • Persentase penurunan emisi GRK sebesar 26,35%. Tahun dasar 2019: 22,60% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021) 			<ul style="list-style-type: none"> • Strategi ketahanan sektor kelautan pesisir dan perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan tanggul pemecah ombak b. pengendalian intrusi air laut c. penyaringan air payau d. penyelamatan biota laut

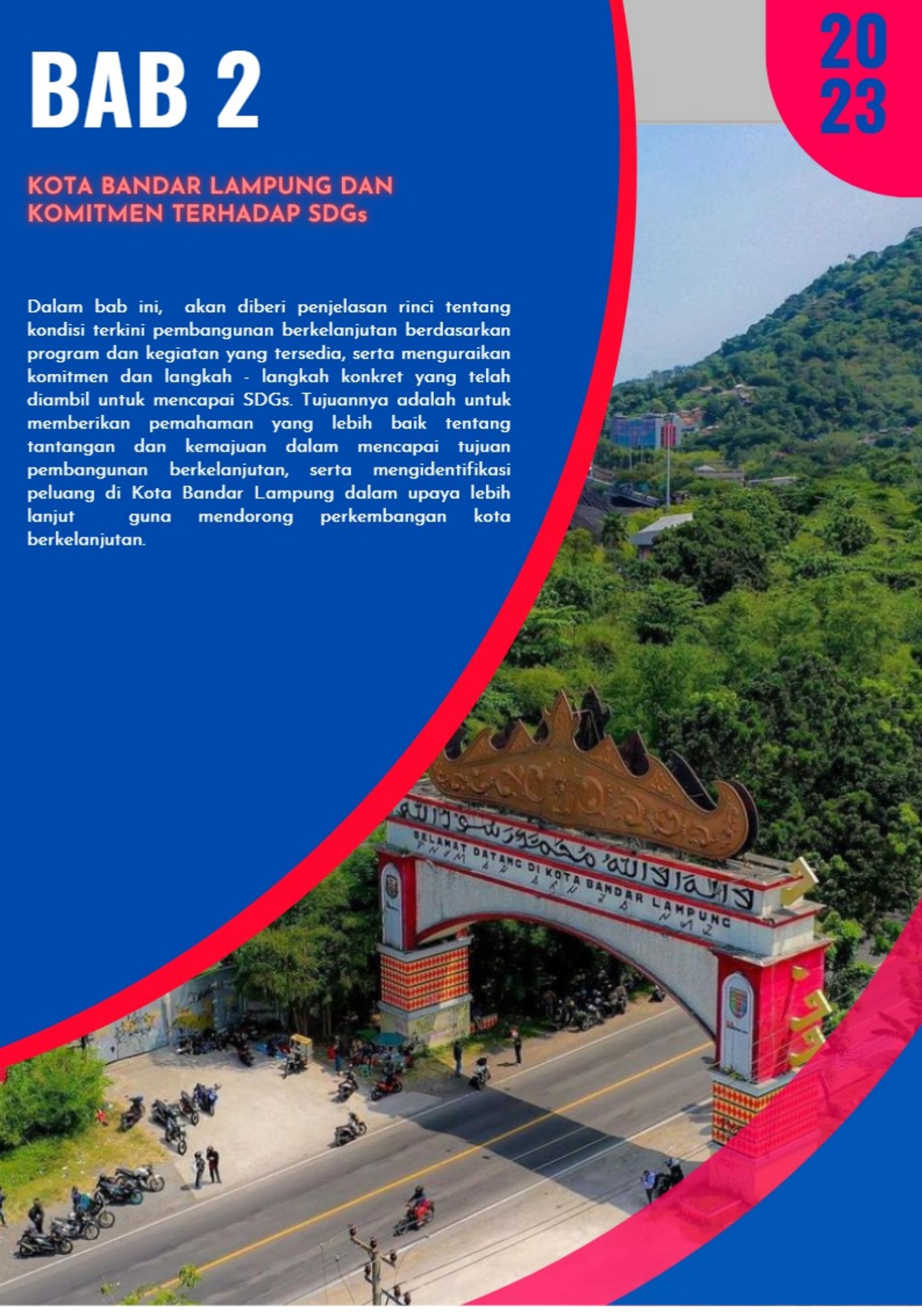


Air Terjun Batuputu
Kota Bandar Lampung

BAB 2

KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KOMITMEN TERHADAP SDGs

Dalam bab ini, akan diberi penjelasan rinci tentang kondisi terkini pembangunan berkelanjutan berdasarkan program dan kegiatan yang tersedia, serta menguraikan komitmen dan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mencapai SDGs. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peluang di Kota Bandar Lampung dalam upaya lebih lanjut guna mendorong perkembangan kota berkelanjutan.





Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bandar Lampung

Melalui Perpres 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kota Bandar Lampung melalui serangkaian kegiatan yang salah satunya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk menghimpun segala informasi, persepsi, serta mengadvokasi bersama dengan akademisi dan sektor terkait lainnya. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pencapaian TPB/SDGs dalam bentuk kegiatan workshop.

Tujuan monitoring atau pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun non pemerintah. Implementasi program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RAD TPB/SDGs Kota Bandar Lampung dapat diketahui dari beberapa komitmen dan kondisi terkini yang menjadi tantangan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen VLR ini dan perencanaan selanjutnya.



Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada target dan sasaran nasional maupun global Tahun 2030 telah menetapkan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan nasional di Tahun 2024 yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Pasal 111/2022 bertujuan untuk :

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan
2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
3. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan
4. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



SDGs UNTUK DUNIA YANG LEBIH BAIK

Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan Agenda dunia untuk kemajuan manusia yang dicantik pada resolusi PBB di bulan Agustus 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030

193 Negara telah menyepakati 17 tujuan

1 Tanpa kemiskinan	7 Energi bersih dan terjangkau	13 Penanganan perubahan iklim
2 Tanpa kelaparan	8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	14 Ekosistem laut
3 Kehidupan sehat dan sejahtera	9 Industri, inovasi dan infrastruktur	15 Ekosistem daratan
4 Pendidikan berkualitas	10 Berkurangnya kesenjangan	16 Perdamaian, keadilan, dan keteladanan yang tangguh
5 Kesetaraan gender	11 Kota dan komunitas berkelanjutan	17 Kemitraan untuk mencapai tujuan
6 Air bersih dan sanitasi layak	12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	

IndonesiaBaik.id Sumber: SustainableDevelopment.un.org Produk: 27-06-2018

Dalam Pasal 8 Pemerintah membentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas Dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, Kelompok Kerja Nasional dan Tim Pakar dalam rangka pencapaian sasaran TPB Nasional Tahun 2024, hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk tim yang terdiri dari fungsional perencana pada perangkat daerah yang mengsinergikan program-program dan kegiatan teknis dalam menyelaraskan dengan program keberlanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan Daerah serta Kota Bandar Lampung dapat tercapai lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*

Berdasarkan dekade aksi (Decade Of Action) pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 (sepuluh) tahun hingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendanaan inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari pemangku kepentingan non pemerintah baik lingkup global, nasional maupun daerah untuk mengakselerasi pencapaian TPB, dalam hal pendanaan TPB bersumber dari :

- Anggaran pendapatan belanja negara
- Anggaran pendapatan belanja daerah dan atau
- Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KOMITMEN KOTA BANDAR LAMPUNG

Pemerintah Kota Bandar lampung dalam program melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs, pada Tahun 2023 memfokuskan pada 6 (enam) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terdiri dari :

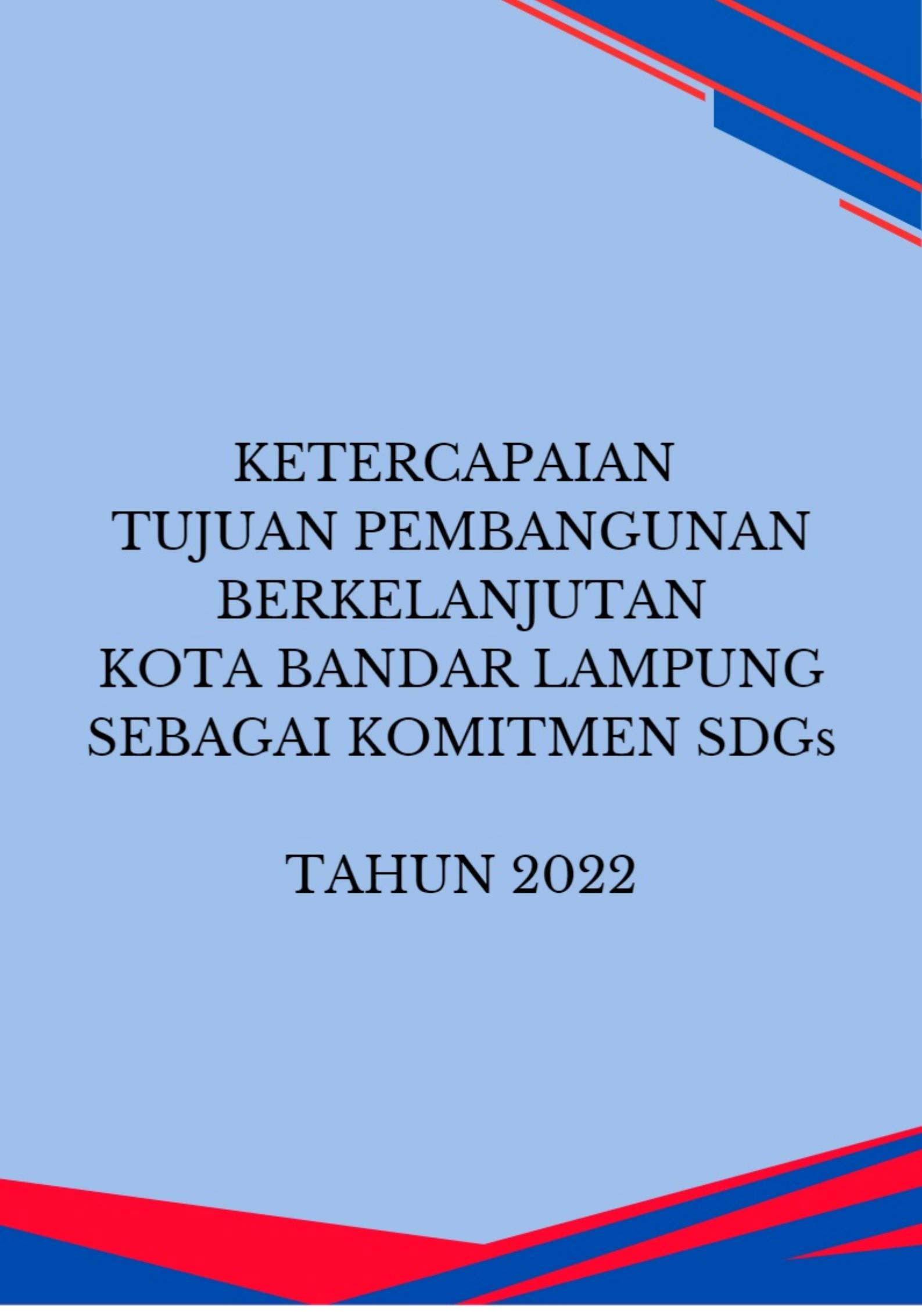
- TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk **kemiskinan**
- TPB 3 : Menjamin **kehidupan yang sehat** dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- TPB 4 : Menjamin kualitas **pendidikan** yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- TPB 5 : Mencapai **kesetaraan gender** dan memberdayakan kaum perempuan
- TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan **air bersih dan sanitasi** yang berkelanjutan untuk semua
- TPB 13 : Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi **perubahan iklim** dan dampaknya

Saat ini Kota Bandar mengalami perubahan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu yang menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam memenuhi standar perkotaan berkelanjutan. Dalam mengakhiri kemiskinan Kota Bandar Lampung, untuk mengukur kemiskinan berdasarkan sumber dari BPS, Tahun 2023 menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miskin 2020-2022

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	94	99	91
Source Url: https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html			

Sumber data utama yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi, BPS Tahun 2023 .



**KETERCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
SEBAGAI KOMITMEN SDGs**

TAHUN 2022

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

“

Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian poin prioritas SDGs Kota Bandar Lampung.

”

Tabel 2.2 Presentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung tahun 2020 - 2022

Percentase Penduduk Miskin	Percentase Penduduk Miskin (%)		
	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin	9	9	8

Sumber : BPS,2023

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa angka kemiskinan kota setempat pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,9% dibandingkan pada tahun 2021. Di Tahun 2021 angka kemiskinan kota ini sebesar 9,11% atau sebanyak 98.760 penduduk dari total 1,18 juta lebih penduduk. Sedangkan pada 2022 turun menjadi 8,21% atau sebanyak 90.510 penduduk. Angka kemiskinan Bandar Lampung pada Tahun 2022 terbilang cukup rendah bila dibandingkan sebelum COVID-19, yakni di Tahun 2019 yang mencapai 8,71% atau sebanyak 91.240 penduduk yang tergolong miskin. Untuk di Tahun 2020 dan 2021 dimana COVID-19 merebak memang ada peningkatan persentase angka kemiskinan. Di Tahun 2020 itu angkanya 8,81% atau 93.740 penduduk miskin, kemudian di 2021 angka kemiskinan bertambah menjadi 9,11% atau sebanyak 98.760 penduduk. Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung masih di bawah angka kemiskinan rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 11,57 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa Bandar Lampung tidak termasuk wilayah Kemiskinan Ekstrem. Tabel tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Kota Bandar Lampung dalam menurunkan tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung.





Tabel 2.3 Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 - 2022

Garis Kemiskinan	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	634743	654576	699

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung angka kemiskinan kota setempat pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,9% dibandingkan pada Tahun 2021. Di Tahun 2021 angka kemiskinan kota ini sebesar 9,11% atau sebanyak 98.760 penduduk dari total 1,18 juta lebih penduduk. Sedangkan pada 2022 turun menjadi 8,21% atau sebanyak 90.510 penduduk. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan Bandar Lampung pada tahun 2022, salah satu intervensi pemerintah melalui berbagai program yang digulirkan, antaranya :

1. Gelaran pasar murah yang hampir setiap pekan dilakukan pemerintah otomatis turut menjaga kestabilan harga.
2. Program bantuan yang diberikan untuk masyarakat bawah terdampak COVID-19
3. Bantuan permodalan untuk pelaku Usaha Mikro Menengah (UMKM)

Sedangkan, Dari sisi garis kemiskinan (GK) atau nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan di Kota Bandar Lampung mencapai Rp. 654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) per bulan. Angka GK Rp. 654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ini terbilang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Tingginya garis kemiskinan (GK) turut dipengaruhi oleh harga-harga kebutuhan pokok di Bandar Lampung yang relatif lebih tinggi daripada di Kota lainnya.



Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan satu data base penduduk sasaran penerima program. Program Penanggulangan Kemiskinan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada masa pandemi covid-19 perekonomian Bandar Lampung Tahun 2020 mengalami kontraksi 1,67% lebih rendah dari target sebesar 2-3%. Kendati demikian, capaian ini lebih baik dari Nasional yang terkontraksi lebih dalam 2,07%. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di dalam sektor pendidikan dan kesehatan serta air bersih dapat diterima, pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan yang melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Grafik 2.1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2020 - September 2021



(Sumber: BPS Bandar Lampung 2022)

Dari Grafik 2.1 di atas terlihat Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 8,50% atau turun 0,79 poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 9,29%. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 13,18% atau mengalami penurunan 1 poin jika dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 14,18%. Selama periode Maret-September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 18,12 ribu orang (dari 254,60 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 236,48 ribu orang pada September 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 58,79 ribu orang (dari 829,33 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 770,54 ribu orang pada September 2021).



KOMITMEN TERHADAP SDGs

Tabel 2.3 Pemetaan Data Indikator TPB/SDGs pada OPD Kota Bandar Lampung

1	• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi
2	• Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
3	• Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan
4	• Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal
5	• Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah
6	• Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Sedangkan upaya kolaborasi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam akelerasi pemulihan ekonomi nasional lewat digitalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berhubungan dengan Tujuan 1 (satu) yaitu Tanpa Kemiskinan. Hal ini menjadi prioritas pemerintah Kota Bandar Lampung dengan realisasi penyediaan panggung untuk produk UMKM Kota Bandar Lampung, menjadi denyut usaha mikro, kecil, dan menengah memutar roda ekonomi di Kota Bandar Lampung, dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mempercepat kebangkitan kembali pelaku UMKM pasca pandemi Covid-19.



Kreasikan tapis dan sulam usus terpajang di Rahayu Galeri yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Toba Bandar Lampung, Rabu (22/2/2023).



Mengentaskan kemiskinan tentu bukan pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan secara sektoral. Namun perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Banyak upaya yang harus ditempuh. Dan inipun harus diiringi dengan sinergitas antar lembaga yang kuat, penganggaran yang memadai serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tidak kalah pentingnya, upaya mencari akar masalah mengapa kemiskinan masih terjadi di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Pertama, selama ini kemiskinan sering diidentikkan dengan pengangguran. Itu artinya, penyediaan lapangan kerja untuk meminimalisir tingkat pengangguran dengan upah minimal sesuai UMK 2023 Rp. 2.991.349 harus dilakukan. Terkait dengan itu, ketersediaan data yang akurat *by name by address* penduduk yang menganggur di Bandar Lampung menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Akan lebih baik lagi, bila data tersebut juga menyediakan alasan mengapa selama ini menganggur, pengalaman kerja yang dimiliki dan pekerjaan yang diharapkan/ingin dilakukan. Dengan demikian, penyediaan lapangan kerja selain harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan atau lembaga, juga harus berkreasi untuk menampung tenaga kerja yang selama ini belum terakomodir.

Kedua, mengingat setiap warga miskin Bandar Lampung adalah anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi keluarga untuk pembebasan dari kemiskinan juga harus menjadi prioritas program pemerintahan daerah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, selain fokus langsung pada individu, keluarga juga harus menjadi fokus pembinaan. Pengentasan kemiskinan keluarga harus dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada keluarga miskin untuk berwirausaha, memfasilitasi akses permodalan/kredit, meningkatkan kualitas produksi dan pengemasan baik perusahaan barang maupun jasa, serta menciptakan pasar yang terbuka, peluang dan manajemen keuangan.

Ketiga, menghapus mental model keluarga miskin yang cenderung kurang produktif seperti kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang memanfaatkan waktu, kurang pengorbanan dan kurang keberanian untuk memulai usaha.

Selain ketiga tantangan tersebut, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengefektifkan kerja Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat kota, kabupaten, Kecamatan maupun desa yang telah dibentuk dalam rangka mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan mulai tahapan perencanaan, sinkronisasi program, pelaksanaan serta sinergitas antar pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Pemerintah juga perlu mengoptimalkan kinerja kader penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan akses penduduk/keluarga miskin serta meningkatkan kegotongroyongan/kepedulian sosial untuk membantu keluarga miskin terutama yang miskin absolut.

Pertumbuhan ekonomi selalu berdampingan dengan angka inflasi, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah banyak melakukan program terkait penurunan inflasi melalui operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi.



Wali Kota Bandar Lampung meninjau langsung lomba kreasi masakan berkolaborasi dengan CSR di Lapangan Kalpataru. Pemkot Bandar Lampung siap bantu permodalan pelaku usaha kelontongan.



Terdapat program gelaran pasar murah yang hampir setiap minggu dilakukan otomatis turut menjaga kestabilan harga. Selanjutnya terdapat berbagai program bantuan yang diberikan untuk masyarakat bawah terdampak Covid-19. Di Kota Bandar Lampung tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,8%, lebih kecil dari Propinsi Lampung yakni sebesar 2,29%, nasional sebesar 2,04%. Sementara target nasional di tahun 2024 sebesar 0%, data ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah kota bandar lampung dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Bandar Lampung. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah kota bandar lampung dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem yakni program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana.



#TPB 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN KESEJAHTERAAN

Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Stunting sebagai Prioritas 2020 - 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada Tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2021 - 2022 melakukan berbagai kegiatan guna percepatan penurunan Stunting.

Adapun program - program untuk merealisasikan tujuan, Goals, TPB ke - 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Pada masa baduta (bawah dua tahun) merupakan (Window Of Opportunity). Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang baik dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan yang opsional. Masalah baduta pendek dan sangat pendek (stunting) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin dan masa bayi/baduta, termasuk penyakit yang diderita selama masa baduta, seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan



Pada Tahun 2020-2023 Dinas Kesehatan mempunyai program yaitu Operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit untuk balita penduduk Kota Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs TPB1 yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi mulut pasien tersebut. Pada Tahun ini 2023 telah dilakukan kembali program tersebut, pendanaan kegiatan Operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit untuk balita penduduk Kota Bandar Lampung berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.

Kegiatan Bakti Sosial ini diperuntukkan bagi warga atau masyarakat Kota Bandar Lampung yang kurang mampu atau yang memang sangat membutuhkan bantuan ini, dan telah terbukti memberi banyak manfaat ke depan, dalam hal ini diperlukan sinergi berbagai pihak terkait agar manfaat itu lebih optimal lagi.

Untuk persyaratan operasi bibir sumbing dan celah langit, pasien tidak boleh dalam keadaan sakit seperti demam, batuk, pilek, atau flu. Anak bibir sumbing minimal harus berusia 3 bulan dan memiliki berat 5 kg, sedangkan pasien celah langit minimal berusia 10 bulan dengan berat badan minimal 10 kg.

Ada beberapa jenis operasi akan dilayani yakni perbaikan operasi yang belum memuaskan, perbaikan celah bibir, perbaikan celah langit-langit mulut, perbaikan hidung miring, dan perbaikan celah gusi.





Program lain untuk menyelaraskan TPB3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah meraih penghargaan dari Kompas TV kategori Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak di Acara Puncak HUT ke 12 Kompas TV.

Penghargaan ini di berikan kepada Kota Bandar Lampung lantaran angka stunting di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan drastis mencapai 10,66 persen di tahun 2023.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting, menjadi landasan operasional penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di daerah dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan. Bandar Lampung bisa jadi contoh dalam penurunan stunting, bagi Kota-Kota dan kabupaten di provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung bisa jadi contoh dalam penanganan stunting, karena penurunannya cukup baik dari 19,4 persen ke 11,1 persen (berdasarkan Rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022), hal ini berkaitan dengan pengarahan dan penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung, membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Bandar Lampung menjadi 0%. Angka prevalensi stunting di Bandar Lampung pada Tahun 2022 11,1%. Jumlah tersebut turun dari Tahun sebelumnya yang mencapai 19,6%, yang mana sudah mencapai target nasional yakni 14%. Sebagai bentuk komitmen tinggi penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber makanan bergizi juga di kota Bandar Lampung tersedia, seperti ikan, telur, dan lainnya, begitu pula dengan hasil pertanian di daerah ini juga tercukupi, Kesadaran masyarakatnya juga bagus, sehingga penurunan stunting di kota ini juga menjadi prestasi tersendiri.



P

emerintah Kota Bandar Lampung menerima penghargaan Menggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penghargaan dan apresiasi tersebut diberikan karena Kota Bandar Lampung dinilai peduli dengan program pengendalian penduduk serta kesejahteraan keluarga di kota tapis berseri. Penghargaan Mangala Karya Kencana merupakan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BKKBN atas dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. Satu yang patut dicontoh dari Kota Bandar Lampung yakni 57% masyarakatnya telah melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB).

Dalam arahan dan penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, salah satu penyebab angka stunting di Kota Tapis Berseri ini turun 8,3% karena lebih dari separuh penduduknya ikut program KB (Keluarga Berencana).

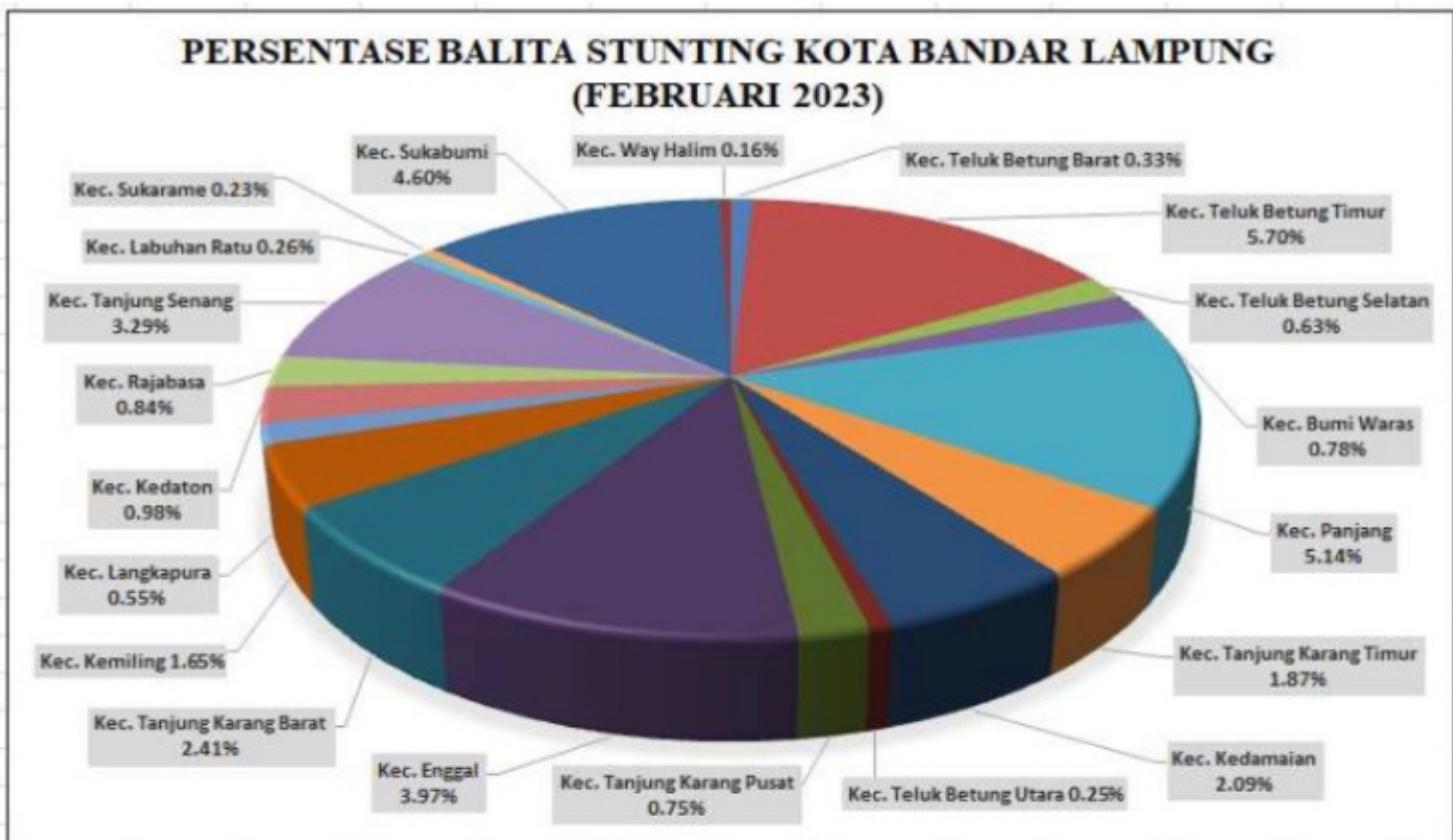
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memfasilitasi masyarakat dengan pengadaan mobil KB untuk pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung agar dapat menjangkau plosok-plosok Kota Bandar Lampung dengan pengedukasian masyarakat yang belum mau ber-KB. Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung ini menyelaraskan TPB3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.





Dari tabel sebelumnya dapat dilihat gambaran tentang presentase jumlah balita stunting tertinggi ada pada Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu sebesar 5,70%, untuk kedua tertinggi ada pada Kecamatan Sukabumi yaitu sebesar 4,60%. Berikut adalah Gambar Grafik Lingkaran Presentase Balita Stunting Kota Bandar Lampung s.d Febuari 2023, sebagai berikut :

Gambar 2.1 Presentase Balita Stunting Perkecamatan se-Kota Bandar Lampung.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023



Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2021-2022 melakukan berbagai kegiatan guna percepatan penurunan Stunting. Adapun program-program untuk merealisasikan Tujuan, Goals, TPB ke-3 yaitu Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. Pemerintah kota bandar lampung telah menetapkan stunting sebagai prioritas dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi angka 6,65% di tahun 2021 menjadi angka 4,13% ditahun 2022. Sementara target nasional 24,4%. hal ini juga menunjukkan bukti keseriusan pemerintah kota bandar lampung dalam menurunkan angka Stunting.

Tabel 2.4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung

Prevalensi Stunting pada Anak Baduta	2018	2019	2020	2021	2022
Bandar Lampung	26,38	6,1	6,60	6,65	4,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023

Tabel diatas menunjukan prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) Kementrian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan untuk Tahun 2019-2022 data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu.



Penerapan SDG's

Program tujuan dalam menerapkan kehidupan sehat dan kesejahteraan

1. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
2. Penguatan sarana, prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan
3. Penyehatan lingkungan
4. Peningkatan ketersediaan formasi dan alat kesehatan
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA
7. Pelayanan KB bagi perempuan usia alat reproduksi
8. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja
9. Peningkatan ketersediaan SDM Kesehatan



Berikut ini merupakan tabel kondisi stunting di Kota Bandar Lampung sampai dengan Februari 2023, dan dapat dilihat secara presentase pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Stunting Kota Bandar Lampung S.D Febuari 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sasaran	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Sangat Pendek	Jumlah Pendek	Jumlah Balita Stunting	% Balita Stunting
1	Telukbetung Barat	2.644	2.142	1	6	7	0,33
2	Telukbetung Timur	3.695	3.230	69	115	184	5,70
3	Telukbetung Selatan	3.208	2.538	7	9	16	0,63
4	Bumi Waras	5.034	2.934	1	22	23	0,78
5	Panjang	6.592	4.958	1	254	255	5,14
6	TanjungKarang Timur	3.292	2.192	7	34	41	1,87
7	Kedamaian	4.666	2.817	15	44	59	2,09
8	Telukbetung Utara	4.771	2.749	1	6	7	0,25
9	Tanjungkarang Pusat	4.535	3.459	2	24	26	0,75
10	Enggal	2.491	1.740	0	69	69	3,97
11	Tanjungkarang Barat	4.854	3.398	51	31	82	2,41
12	Kemiling	5.822	4.362	11	61	72	1,65
13	Langkapura	3.011	2.541	1	13	14	0,55
14	Kedaton	4.352	3.574	1	34	35	0,98
15	Rajabasa	4.261	3.671	13	18	31	0,84
16	Tanjung Senang	4.061	2.859	7	87	94	3,29
17	Labuhan Ratu	3.978	3.526	4	5	9	0,26
18	Sukarame	5.049	4.308	2	8	10	0,23
19	Sukabumi	5.087	3.847	28	149	177	4,60
20	Way Halim	5.455	3.722	2	4	6	0,16
KOTA BANDAR LAMPUNG		86.858	64.567	224	993	1.217	1,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2023



Capaian Prioritas Daerah dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ditargetkan penurunan Stunting menjadi <6,40%.

Target menurunkan Pravelensi Stunting di Kota Bandar Lampung juga selaras dengan kebijakan Provinsi Lampung dan Nasional yang sangat focus dalam menurunkan angka stunting yang ada, hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Berikut data Pravelensi stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) pada level Provinsi dan Nasional. Data Tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar (Rikesda) Kementerian Kesehatan RI Bulan Maret 2019, sedangkan data Tahun 2019, sedangkan data Tahun 2019 - 2022 berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)

Tabel 2.6 Pravelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) 2018 - 2022

Prevalensi Stunting pada Anak Balita	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	27,33	26,26		18,50	15,2
Nasional	20,10	30,88	27,67	26,92	24,40

Penanganan Stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berikut adalah Dasar Hukum Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung yaitu (1) Salinan Lampiran II Keputusan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor Kep. 101/M.PPN/HK/06/2022

Penguatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain: masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan pembangunan keluarga serta pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi, serta pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.



Tantangan pada pelayanan KB meliputi:

Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, rendahnya kesertaan KB untuk pria, serta tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi.

Tantangan pada kesehatan reproduksi remaja, antara lain: angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi; masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja, dan tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain: masih tingginya jumlah keluarga miskin, rendahnya pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak; rendahnya partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, rendahnya kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia, dan terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Seluruh Penduduk Semua Usia. Pada tahun 2022-2023, Pencapaian pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu melahirkan/bersalin secara berurutan sebesar 94,20% dan 95,64%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019) terjadi penurunan namun tidak signifikan. Dengan kondisi pandemi Covid-19, Kota Bandar Lampung masih mampu melaksanakan kegiatan pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut secara maksimal.



Pada saat ini setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung (126 kelurahan) telah memiliki Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Keberadaan Posbindu ini sama halnya dengan Posyandu yaitu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) artinya keberadaan Posbindu ini dibentuk oleh dari dan untuk masyarakat dengan difasilitasi oleh petugas kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Namun belum semua Posbindu dilengkapi dengan sarana penunjang pemeriksaan Posbindu Kit seperti peralatan cek gula darah, kolesterol dan belum adanya petugas terlatih di setiap Puskesmas untuk pengelolaan pasien dengan dengan gangguan jiwa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk pembiayaannya.

Penurunan Angka Stunting dan Penguatan Program Bangga Kencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemkot Bandar Lampung terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di tahun 2023 ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, tingkat prevalensi stunting di Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebesar 11,1 persen. Dan di targetkan Bandar Lampung mencapai 0%

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bahkan sudah melaunching Remaja dan Organisasi Masyarakat Antisipasi Stunting (ROAMING) pada November 2022 untuk membantu pencegahan stunting.

Melalui ROAMING Eva Dwiana berharap bisa membantu Posyandu di tiap kecamatan dalam melakukan pendataan dari rumah ke rumah.

Wali Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa Target Pengentasan Stunting tahun 2023 harus tidak ada lagi stunting di Kota Bandar Lampung. Dinas PPKB Bandar Lampung menyebut Wali Kota Eva Dwiana begitu fokus terkait penanganan stunting. Termasuk memberikan dukungan penuh untuk menurunkan angka stunting di kota ini. Berdasarkan pada 2 fokus Raperda tahun ini yaitu penguatan program Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) dan penurunan angka stunting, serta BKKBN harus dapat melihat capaian-capaiyan yang konkret dan terukur.



#TPB 4 PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

“ Tujuan nomor empat dari 17 tujuan SDGs adalah pendidikan yang berkualitas yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, dan Kebudayaan memiliki tujuan pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan serta pembinaan Kebudayaan secara berkesinambungan.

Layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional diharapkan dapat menghasilkan insan cerdas, terampil, dan kompetitif. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi indikator - indikator kinerja di bidang pendidikan, dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai - nilai kearifan lokal.

Grafik 2.2 Angka Presentase Capaian Kinerja dengan Angka Partisipasi Kasar

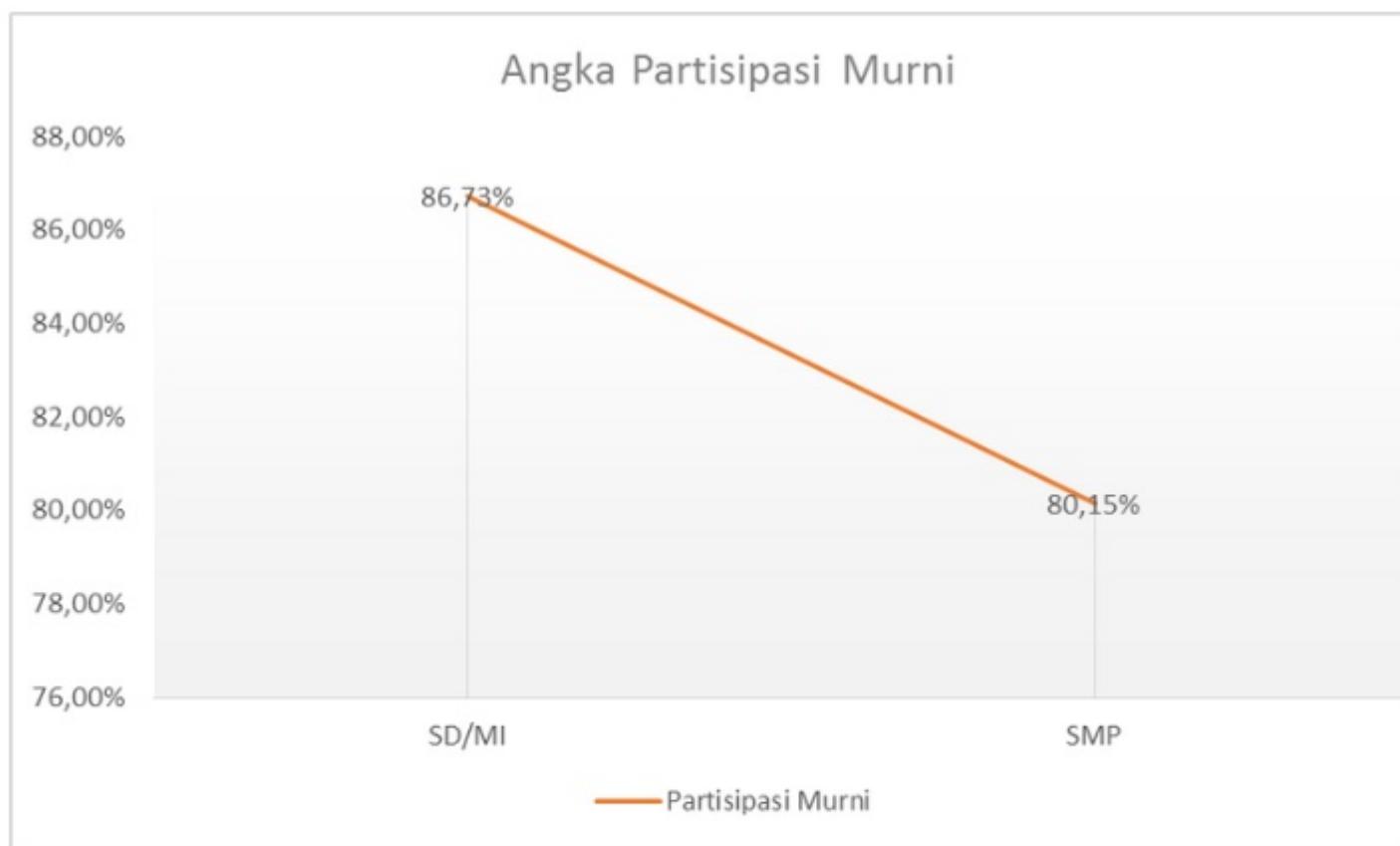


Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, dan Kebudayaan memiliki tujuan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan serta pembinaan Kebudayaan secara berkesinambungan.

Layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional diharapkan dapat menghasilkan insan cerdas, terampil, dan kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang pendidikan, dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Grafik 2.3 Angka Presentase Capaian Kinerja dengan Angka Partisipasi Murni



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 2022



Sejak tahun 2013, pemerintah menetapkan strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013. PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD-HI bertujuan menyediakan layanan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan melalui komitmen semua unsur terkait. Untuk mengoperasionalkan Peraturan Presiden tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD-HI 2020-2024 disiapkan sebagai acuan pelaksanaan pusat dan daerah. Namun, meski kerangka kerja nasional untuk PAUD-HI sudah ditetapkan, operasionalisasi pemerintah daerah terhadap kebijakan RAN dan kebijakan PAUD-HI sangat bervariasi yang mengakibatkan perbedaan besar dalam pembiayaan dan akses terhadap layanan PAUD-HI.

Evaluasi atas pencapaian kinerja menunjukkan pencapaian hasil sama atau diatas target yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kecuali untuk indikator rata - rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka partisipasi Murni (APM) SMP dipergunakan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun yang akan datang.



Penerapan SDG's

Program Bina Lingkungan (Biling) merupakan program sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2013/2014. Program Bina Lingkungan (Biling) memberikan dampak positif seperti mensukseskan program wajib sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan meningkatkan jumlah masyarakat melek huruf. Pada tahun 2018, kuota siswa SMP Biling mencapai 6000 siswa dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2020. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi Bina Lingkungan (Biling) atau Afirmasi SMP negeri se-Kota Bandar Lampung, serentak dibuka pada Tanggal 4-6 Juli 2022.



Dalam rangka untuk peningkatan pendidikan berkualitas di Kota Bandar Lampung terdapat program utama yakni program pengelolaan pendidikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa pembangunan pendidikan fisik dan non fisik Kota Bandar Lampung bagi Pendidikan SD dan SMP.

Upaya-upaya pembangunan fisik yaitu:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan UKS, Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada SD & SMP.
2. Melaksanakan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas, Perpusatakan, Sarana dan Prasarana serta Utilitas Sekolah.
3. Pengadaan perlengkapan siswa dan sekolah

Penerapan SDG's

Selain itu, upaya - upaya pembangunan Non Fisik yang dimaksud yaitu:

1. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
2. Pembinaan minat dan bakat serta kreativitas Siswa
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan PAUD berdasarkan HI (*Holistik Integratif*) yaitu penanganan anak usia dini secara utuh yang mencangkup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan.

Selanjutnya ada upaya pemerintah kota pada program pendidik dan tenaga tingkat pendidikan yaitu pemerataan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan pendidikan beasiswa bagi tenaga pendidik atau guru - guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.



Tantangan Pada Dunia Pendidikan ini adalah :

1. Guru Belum Siap Menggunakan Teknologi

Banyak siswa dan guru berpenghasilan rendah tidak memiliki perangkat digital atau keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis digital atau online ini. Menurut data dari UNICEF, pada tahun 2020, sebanyak 67% guru melaporkan kesulitan dalam mengoperasikan perangkat dan menggunakan online platform dalam proses pembelajaran

2. Globalisasi. Di mana standar kualitas sekolah dan lulusan sekolah kita tidak hanya diukur dalam skala lokal atau nasional, tapi dalam skala global. Sehingga kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung harus dijalankan dengan mengikuti standar internasional.

3. Perubahan pola belajar: Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, pola belajar masyarakat juga akan terus berubah. Pendidikan harus mampu mengadaptasi pola belajar yang baru ini.

4. Kurikulum yang terbatas: Kurikulum yang terbatas mungkin tidak mampu mencakup semua materi yang diperlukan oleh siswa di masa depan. Pendidikan harus mampu memberikan materi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan.

Masalah keuangan: Pendidikan di beberapa daerah mungkin mengalami masalah keuangan, sehingga tidak dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada siswa.

5. Persaingan global: Persaingan global akan semakin ketat di masa depan, sehingga pendidikan harus mampu menyiapkan siswa agar dapat bersaing di tingkat internasional.

Beberapa hal yang diperlukan dalam memenuhi tantangan pendidikan di masa depan :

- Kurikulum yang relevan: Kurikulum harus diperbarui secara teratur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di masa depan. Materi yang diajarkan harus bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan.
- Pendidikan yang inklusif: Pendidikan harus menyediakan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.
- Teknologi yang tepat: Teknologi harus digunakan secara tepat dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif.
- Sumber daya manusia yang berkualitas: Guru dan tenaga pendidik harus terlatih dan memiliki kemampuan yang memadai untuk mengajar siswa di masa depan.
- Lingkungan belajar yang nyaman: Lingkungan belajar harus nyaman dan kondusif bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif.
- Kepemimpinan yang efektif: Kepemimpinan yang efektif di sekolah dan lembaga pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Gerak Cepat untuk mewujudkan TPB4 yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, telah disusunlah Indikator pendidikan bersumber dari indikator sosial budaya BPS Tahun 2022 dengan merujuk pada indikator sebagai berikut;

- Bersekolah adalah yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar SD dan SMP, SMA dan pendidikan tinggi) maupun non formal (Paket A, Paket B, Paket C yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional), Kementerian Agama, Instansi lainnya negeri maupun swasta
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan suatu jenjang pendidikan
- Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan
- Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya
- Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Di dalam dokumen kependidikan Kota Bandar Lampung menunjukkan data yang signifikan, antara nya :

- Jumlah Sekolah TK Tahun 2022 sebesar 370 unit
- Jumlah Guru TK Tahun 2022 sejumlah 1.999 guru
- Jumlah Murid TK Tahun 2022 sejumlah 14.582 siswa
- Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA) dibawah Kementerian Agama Tahun 2022 sebesar 824 unit
- Jumlah Sekolah SD Tahun 2022 sebesar 240 unit
- Jumlah Guru SD Tahun 2022 sejumlah 4.968 guru
- Jumlah Murid SD Tahun 2022 sejumlah 90.737 siswa
- Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2022 sebesar 62 unit
- Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2022 sejumlah 1.094 guru
- Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2022 sejumlah 17.220 siswa
- Jumlah Sekolah SMP Tahun 2022 sebesar 137 unit
- Jumlah Guru SMP Tahun 2022 sejumlah 3.285 guru
- Jumlah Murid SMP Tahun 2022 sejumlah 46.286 siswa
- Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2022 sebesar 30 unit
- Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2022 sejumlah 612 guru

Jumlah murid, guru dan bangunan sekolah :

- Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2022 sejumlah 6.208 siswa
- Jumlah Bangunan Sekolah SMA Tahun 2022 sebesar 67 unit
- Jumlah Guru SMA Tahun 2022 sejumlah 1.797 guru
- Jumlah Murid SMA Tahun 2022 sejumlah 26.750 siswa
- Jumlah Bangunan Sekolah SMK Tahun 2022 sebesar 62 unit
- Jumlah Guru SMK Tahun 2022 sejumlah 1.687 guru
- Jumlah Murid SMK Tahun 2022 sejumlah 25.776 siswa
- Jumlah Bangunan Sekolah MA Tahun 2022 sebesar 16 unit
- Jumlah Guru MA Tahun 2022 sejumlah 372 guru
- Jumlah Murid MA Tahun 2022 sejumlah 3.763 siswa



Angka Partisipasi Kasar Kota Bandar Lampung untuk jenjang TK, pada Tahun 2022 sebesar 43.12 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 36.12. Dan untuk Angka Partisipasi Kasar jenjang SD pun sama mengalami peningkatan Tahun 2022 sebesar 107.556 dibanding Tahun sebelumnya yaitu sebesar 105.01. Namun untuk Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP mengalami penurunan yaitu Tahun 2022 sebesar 53.200 sementara Tahun 2021 sebesar 90.50.



Dari data BPS Tahun 2022 dapat terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandar lampung Tahun 2021 sebesar 14,70 dan Tahun 2022 sebesar 14,71. Dapat terbaca dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2021) merumuskan tabel sasaran strategis dan indikator kinerja dengan sub kegiatan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Bandar Lampung Angka Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan Realisasi pada Tahun 2021 sebesar 84,44, dengan target 85,90 pada Tahun 2022, sementara Tahun 2022 terealisasi sebesar 81,11



TPB 5 KESETARAAN GENDER

INDEKS GENDER KOTA BANDAR LAMPUNG

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indeks Pembangunan Gender Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebesar 93,930, dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 94,020. Begitupun Indeks Pemberdayaan Gender pada Tahun 2022 sebesar 72,33 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 71,69.



Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berhasil merealisasikan Persentase Kekerasan Perempuan yang tertangani Tahun 2021 sebesar 100% dan Tahun 2022 sebesar 100%. Persentase Perempuan pada lembaga pemerintahan mencapai angka sebesar 105,12% Tahun 2021, namun hanya sebesar 46% Tahun 2022 . program pencegahan atau upaya yang dilakukan dengan cara penanaman pemahaman hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesadaran hukum. Upaya pencegahan antara lain membantu perempuan untuk modal usaha skala mikro dan kecil sehingga ada kemandirian. Pelayanan dan penanganan seperti pelayanan kesehatan, psikis, sosial, ekonomi, dan bantuan hukum. Yang terakhir yaitu dengan koordinasi dan kerja sama dari berbagai lembaga. Kota Bandar Lampung butuh partisipasi lembaga masyarakat, dinas tidak berjalan sendiri tanpa koordinasi, partisipasi kerja sama dari pihak lain yang saling bersinergi.



Dalam upaya meningkatkan rasa empati dan kesadaran masyarakat dari semua lapisan masyarakat untuk memutus mata rantai kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, untuk bersama-sama menjadi satu agar dapat mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melindungi perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan.





“

Tujuan nomor lima dari 17 tujuan SDGs adalah kesetaraan gender yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

”

Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di setiap kabupaten/kota bahkan di saat pandemi ini justru meningkat, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Kasus kekerasan masih sangat mungkin terjadi di daerah yang sudah mendapat KLA peringkat Nindya atau Utama sekalipun. Penyebab kekerasan itu sendiri bisa multifaktor, hanya saja bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pemenuhan hak anak yang komprehensif.



Kota Bandar Lampung meraih Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama 66 Kabupaten dan Kota lainnya. Penghargaan Atas Capaian KLA dengan Predikat Nindya tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan KLA yang diraih tersebut merupakan Apresiasi, sebab Kabupaten dan Kota telah mampu merencanakan menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kebijakan KLA bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem pembangunan berbasis hak anak di tingkat kabupaten/kota. Sistem tersebut dikembangkan dengan merujuk pada konsep pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tahapan pengukuran KLA dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KLA oleh Kemen PPPA dengan melibatkan beberapa pihak terkait secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.



KOMITMEN BANDAR LAMPUNG



Disamping itu, Kota Bandar Lampung meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan KLA yang diraih tersebut sebagai Apresiasi, sebab Kabupaten dan Kota telah mampumerencanakan menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selanjutnya terkait Tujuan ke lima (5) Kesetaraan Gender juga menjadi perhatian khusus dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung.



Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan peluncuran strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) sanitasi aman Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini selain menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Tujuan 6 (enam) juga terkait erat dengan tujuan 3 yaitu Kesehatan. Kemudian, Proyek CRIC (*Climate Resilience Inclusive Cities*) yang didanai oleh Uni Eropa dan bekerja sama dengan UCLG ASPAC (*United Cities and Local Governments Asia Pacific*) merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Tujuan 13 tentang perubahan iklim.



Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja keras untuk merealisasikan TPB5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan untuk menurunkan Rasio Kekerasan Pada Anak yang terjadi pada Tahun 2021 sebesar 101 Kasus menurun menjadi sebesar 78 Kasus untuk Tahun 2022, dan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai keberhasilan dengan Persentase Kekerasan Anak yang tertangani Tahun 2021 sebesar 100% begitu juga yang terealisasi pada Tahun 2022 sebesar 100%, salah satu upaya dalam menanggulangi kasus Kekerasan pada anak adalah dengan pendampingan, terutama diberikan pendampingan terhadap korban secara langsung. Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya agar para korban merasa aman dan diberikan terapi mental untuk kemudian korban tidak terpuruk dikemudian hari. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan fasilitas kesehatan, bantuan hukum, penegakkan hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan tokoh agama, pemulangan dan reintegrasi sosial untuk memfasilitasi kasus-kasus yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak. TPB5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan





Mencapai kesetaraan gender dan Memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Anugerah Parahita Ekapraya sendiri merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.



Pada kesempatan itu I Gusti Ayu Bintang Darmawati yaitu sebagai Menteri PPA 1, berharap melalui penghargaan yang diberikan kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati dapat termotivasi untuk terus menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak. Prestasi Pemerintah Kota Bandar Lampung ini tertuang dalam surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor: 72/Men/D.KG/KG.05/9/2021 tertanggal 21 September 2021, perihal pemberitahuan pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 5 (lima) yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender" yang diuraikan dalam beberapa indikator yang terlihat dalam Grafik 2.4 berikut.

Grafik 2.4 Target Pencapaian SDGs 5



Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 2021

Dari Grafik 2.5 di atas terlihat target Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam Indikator 5.1.1 yaitu "ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin" mencapai 100%. Sedangkan untuk Indikator 5.2.2 yaitu "proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir", Dinas PPPA juga menargetkan sampai 100%. Indikator ini mengukur tentang upaya pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini bermanfaat untuk mengukur komitmen negara terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang kebijakan publik, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi serta perkawinan dan keluarga.

Penerapan SDG's



Untuk mencapai indikator-indikator tersebut Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merancang beberapa program dan kegiatan seperti terlihat dalam Grafik 5.2 pada Lampiran. Dari Grafik 5.2 tersebut diketahui Dinas PPPA memiliki sebelas program terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender. Sebelas program tersebut yaitu:

- Program perlindungan perempuan
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
- Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan kabupaten/kota (DAK)
- Program perlindungan khusus anak
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (DAK)

Selain terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, target pencapaian dalam Tujuan 5 yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender" juga terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung terutama pada Indikator 5.5.2* yaitu "proporsi perempuan yang berada di posisi managerial". Dari Grafik 3.4 dapat dilihat target pencapaian jumlah perempuan yang duduk di posisi managerial yang cukup konsisten setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen yang cukup tinggi untuk mencapai target pada Tujuan 4 guna meningkatkan kesempatan dan keterlibatan gender perempuan sebagai peramu dan penentu kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Komitmen ini kemudian diimplementasikan melalui berbagai program yang salah satunya adalah program Mutasi dan Promosi Aparat Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya. Program ini didokumentasikan dengan menggunakan Matriks 2b seperti dalam Grafik 5.3 pada Lampiran.

Kesetaraan gender menjadi prioritas pembangunan Pemkot Bandarlampung dalam Tahap Pembangunan IV (2021-2025) untuk mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Yakni masyarakat kota yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satunya dengan meningkatkan kesetaraan gender di berbagai instansi dan lembaga, membuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan diri. Serta adanya upaya untuk membatasi ruang gerak kekerasan terhadap kaum perempuan, yang membutuhkan perlindungan, baik berupa hukum maupun fasilitasi.



Adanya pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia disebabkan permasalahan pada kesetaraan gender. Hadirnya ketidakadilan gender terjadi adanya marginalisasi perempuan, subordinasi di ranah politik, stereotype, beban ganda, dan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan berupa fisik, psikis, seksual, ekonomi dan banyak lagi.

Kekerasan berbasis gender ini sering kali menggunakan tubuh perempuan sebagai posisi tawaran secara online. Hal ini menciptakan pola pikir tidak adanya korelasi antara pemahaman yang bagus dan pengetahuan tentang perempuan.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

#6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Tujuan nomor enam dari 17 tujuan SDGs adalah air bersih dan sanitasi layak yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Dalam bahasa Inggris, tujuan ini disebut sebagai clean water and sanitation yaitu ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

Sanitasi dan kesehatan memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan seperti layaknya air bersih dan sanitasi. Sanitasi yang tidak layak dan tidak aman akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada proses sebuah pembangunan. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air dan sanitasi. Sanitasi layak ialah sanitasi yang memenuhi syarat untuk kesehatan yaitu seperti : klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.





SANITATION AND WATER FOR ALL

Pada Tahun 2024, Indonesia memiliki target nasional pencapaian untuk akses air limbah domestik layak ditargetkan mencapai 90% (termasuk 15% akses aman), selaras dengan TPB 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

DEFINISI AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN (ADAPTASI SDGs)

- Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan
- Akses sanitasi aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada IPALD atau menggunakan tangki septik

UPAYA KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Penerbitan kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Optimalisasi sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bakung
3. Pelaksanaan penilaian kinerja operator pengelola Air Limbah Domestik

PROSES PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DI IPLT

Pembuangan

Air Limbah dari Tanki Truk dibuang melalui Lubang Inlet.



Pembuangan

Air Limbah dari Tanki Truk dibuang melalui Kolam Penampungan Manual

Equalisasi

Air Limbah yang sudah disaring ditampung di Bak Equalisasi.

2

3

4

5

Penyaringan

Air Limbah disaring di mesin SSR Septic Sludge Receiver

Dewatering

Air dan Lumpur dipisahkan oleh mesin Screw Press

Kolam Pengolahan

Air dialirkan ke Kolam Pengolahan, dimulai dari kolam Anaerobik, Faktifatif dan terakhir Maturasi

Pengeringan
Lumpur ditampung di tempat penampungan sementara untuk dikeringkan.



LUMPUR TINJA DI BANDAR LAMPUNG DIOLAH JADI PUPUK

Langkah mewujudkan Kota cerdas Pemerintah Kota Bandar Lampung salah satunya yaitu mengoperasikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Unit tersebut memiliki kemampuan mengolah limbah domestik hingga 90 meter kubik, mesin pengelola bekerja memisahkan air dan kandungan lumpur, kemudian air yang dihasilkan terbebas dari bakteri berbahaya dan dibuang ke sungai. Sedangkan lumpur tidak bisa dibuang ke sungai dan menumpuk jika dibiarkan, maka kemudian lumpur diolah untuk dibuat pupuk tanaman. Dari pengelolaan itu menyisakan lumpur, ini yang dapat dimanfaatkan untuk dikelola sebagai pupuk. Lumpur hasil pengolahan dipisahkan dan dikeringkan agar lebih mudah diolah, kemudian lumpur dimasukan dalam kotak dan dicampur dengan cacing. Cacing akan hidup dan menghasilkan kotoran yang mengandung unsur hara pada tanah. Kandungan tersebut bermanfaat untuk kesuburan tanah yang ditempatinya. uji coba yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan pendampingan dari SNV.



Salah satu mesin pengolah lumpur tinja di IPLT Bandar Lampung. (DN Times/Rohmah Musta'rida).



Kolam IPLT Bandar Lampung. (DN Times/Rohmah Musta'rida).



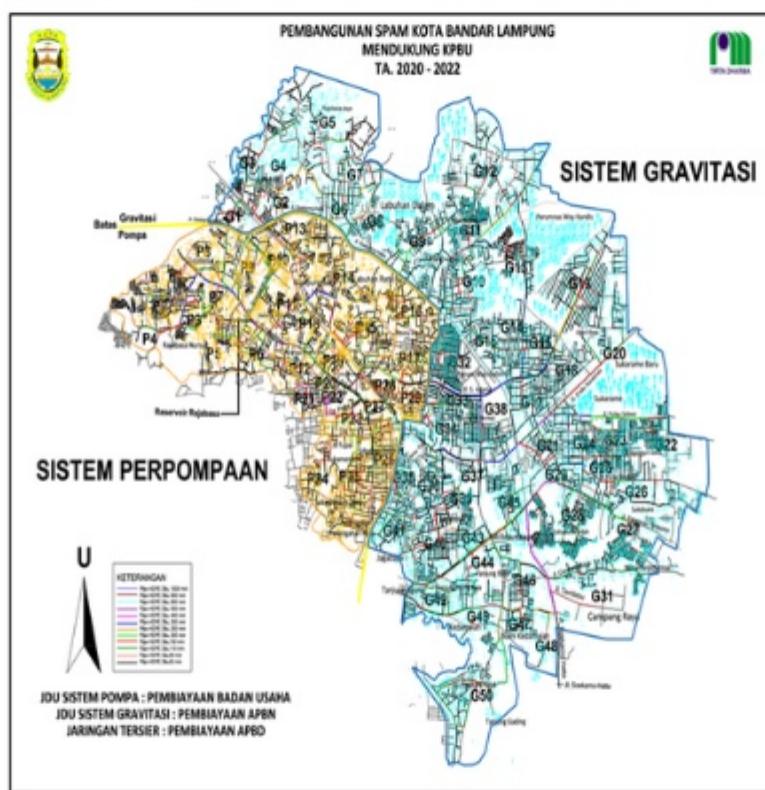
Ampas lumpur tinja di IPLT Bandar Lampung ditumbuhkan tanaman sayuran. (DN Times/Rohmah Musta'rida).

Ada empat kolam utama di IPLT Bandar Lampung, yaitu kolam konvensional, aerob, fakultatif, dan matirasi. Siklus pengolahan berulang ini berakhir pada ampas sisa pengolahan ditumbuhki tanaman secara sendirinya, namun untuk saat ini ampas hasil pengolahan tinja baru diletakan di depan mesin pengolahan, ditimbun di halaman belakang IPLT, dan sebagai campuran dekomposisi sampah TPA.



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Jaringan Perpipaan yang sumber pembiayaannya berasal dari mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kapasitas air baku 750 liter/detik yang akan melayani 60.006 sambungan rumah atau 300.000 jiwa di 8 (delapan) Kecamatan yakni Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sukabumi



Persentase pemenuhan Sistem penyediaan air minum (SPAM) terhadap masyarakat di Kota Bandar Lampung terus meningkat, hal ini dapat terlihat dari data Tahun 2021 sebesar 46.858 sambungan rumah tangga, dan Tahun 2022 sebesar 46.879 sambungan rumah tangga, di realisasikan pula Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023 sebesar 46.879 sambungan rumah tangga terus menembus pelosok pemukiman masyarakat Kota Bandar Lampung. Begitu pula dengan Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak Konsumsi sebesar 85,76% Tahun 2021 dan 86,23% sebesar Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Komitmen Kota Bandar Lampung juga mewujudkan peningkatan Persentase jumlah rumah tinggal dengan akses sanitasi layak sebesar 87,50 Tahun 2021 dan 87,71 tahun 2022 terus meningkat. Hal terpenting tak terlewatkan dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan nyaman bagi warga Kota Bandar Lampung juga terwujud dalam persentase akses jamban di Kota Bandar Lampung di Tahun 2021 sebesar 100%.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melakukan upaya budidaya Maggot BSF (Black Soldier Fly) yang diyakini mampu menjadi salah satu solusi untuk menangani sampah organik rumah tangga. Maggot adalah salah satu solusi dalam pengolahan limbah organik agar tidak menumpuk dan meningkatkan kadar amoniak di tempat pemrosesan akhir (TPA). Hal ini karena pakan maggot adalah limbah organik rumah tangga (limbah sayuran, buah-buahan, limbah peternakan, dan limbah pengolahan makanan).

Selain memiliki kualitas yang bagus untuk menguraikan sampah, Maggot juga diperuntukan sebagai pakan alami ternak. Sehingga saat ini maggot memiliki peluang usaha yang sangat besar, mengingat usaha peternakan dan perikanan yang membutuhkan Maggot juga meningkat.



Telur Maggot



Pemotongan sampah organik untuk pakan Maggot



Rak Media Penetasan Telur Maggot



Penyemprotan Suplemen Organik Cair



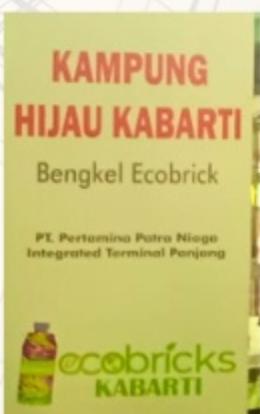
Maggot yang hampir siap dipanen



Pemberian pakan organik pada larva Maggot

Pemerintah Kota Bandar Lampung didukung SNV (Netherland Development Organization) mengembangkan kampung hijau terintegrasi di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Masyarakat kampung tersebut didorong untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengelolaan sanitasi aman. Terdapat empat indikator kampung hijau terintegrasi yakni sanitasi aman dan perilaku hygiene, pemanfaatan lahan pekarangan, pengelolaan sampah rumah tangga serta partisipasi masyarakat. Untuk merubah perilaku kuncinya adalah konsisten, dimana keberlanjutan itu ada di masyarakat sehingga bagaimana memastikan masyarakat punya inisiatif dan berdaya diperlukan kerjasama yang apik dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kota Bandar Lampung. Implementasi program kampung hijau terintegrasi telah dilakukan sejak September 2021 mulai dari 7 RT di 6 kelurahan. Kemudian November 2022 menjadi 15 RT yang mengikuti program tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini telah mendorong terbentuknya 9 bank sampah di 5 kelurahan, terbentuknya 2 kelompok pengelola prasarana (KPP) MCK komunal, 5 RT di 5 kelurahan menginisiasi arisan sedot tinja, 7 rumah menyedot tangki septik, 4 rumah memperbaiki tangki septik dengan standar SNI, 3 demplot kebon komunal serta penataan dan penghijauan gang.



Untuk peningkatan akses sanitasi menuju 100% akses layak dan aman harus memenuhi jenis tangki septik yang dapat digunakan yaitu tangki septic konvensional sesuai standar SNI dan tangki septic fabrikasi bersertifikat. Definisi dari tangki septic yaitu suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerob membentuk bahan-bahan larut air dan gas. Dijelaskan pula bahwa tangki septic harus kedap air. Selain itu tangki septic perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari tangki septic itu dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi mengelola secara penuh Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Bakung. IPLT itu dibangun oleh Kementerian PUPR saat ini dikelola PD Kebersihan Tapis Berseri. Kebutuhan anggaran pengelolaan IPLT di 2023 dapat diperkirakan 1,7 miliar rupiah. Anggaran itu digunakan untuk perawatan gedung, mesin, serta operasional pengelolaan IPLT. Menurutnya untuk kebutuhan itu pemerintah akan memberikan anggaran senilai 2 miliar rupiah IPLT Bandarlampung dilengkapi dua unit mesin pengolah lumpur tinja. Selain mengolah secara mekanikal, IPLT juga dilengkapi pengolahan secara manual apabila terjadi gangguan pada mesin.

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau sumatera dan pulau jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota bandar lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa. SNV mendukung pemerintah kota bandar lampung untuk memenuhi layanan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusi sesuai dengan target nasional. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, sedangkan akses sanitasi aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL) atau menggunakan tangki septic dengan jenis kloset leher angsa yang di sedot minimal 1x dalam jangka waktu 3 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Kondisi sanitasi Kota Bandar Lampung melalui progress sebagai berikut:

1. Progress kepemilikan jamban sehat dengan tangki kedap meningkat 22,7%, jamban dengan cubluk meningkat 2,7%, jamban tanpa penampungan/cemplung menurun 16,3%
2. Progress pengangkutan dengan truk tinja uang tidak bocor meningkat 8,8%, tidak disedot dan diangkut meningkat 2,9%
3. Progress akses cuci tangan pakai sabun (CPTS) meningkat 5,9%, ada sarana CPTS meningkat 6,3%
4. Progress status kepemilikan tempat penyimpanan sampah padat rumah tangga yang aman meningkat 16,2%, kepemilikan tempat penyimpanan sampah yang tidak aman berkurang 8,5%, rumah tangga yang tidak punya tempat penyimpanan sampah menurun 11,5%





Gambar 2.2 Target Upaya Kota Bandar Lampung

Target Provinsi Lampung 2024:	Target Kota Bandar Lampung 2024:
Air Limbah Domestik: 90% RT Memiliki Akses Sanitasi Layak (termasuk 10% Akses Aman)	Air Limbah Domestik: 95% RT Memiliki Akses Sanitasi Layak (termasuk 12% Akses Aman)
Praktik BABS di Tempat Terbuka: 0% RT	Praktik BABS di Tempat Terbuka: 0% RT

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2022

Tahun 2019, pemerintah kota Bandar Lampung melakukan audiensi ke Kementerian PUPR dan menyampaikan Surat Minat terkait Program Penyehatan Lingkungan TA 2020 untuk kegiatan Optimalisasi IPLT Bakung dengan pembiayaan dana pusat

- Tahun 2021 dilakukan konstruksi optimalisasi IPLT Bakung dengan menambah sistem pengolahan mekanis yaitu alat pengering mekanis. Saat ini beroperasi sistem konvensional dan sistem mekanis, Penambahan sistem mekanis untuk mempercepat pengolahan lumpur tinja yang diterima.
- Melalui optimalisasi, kapasitas pengolahan IPLT Bakung meningkat dari 45 m³/hari menjadi 90 m³/hari.
- Tahun 2022, IPLT Bakung sudah mulai beroperasi.

Kota Bandar Lampung memiliki akses sanitasi sebesar 95,26% namun SNV Indonesia mengatakan bahwa kadar sanitasi aman di Kota Bandar Lampung masih berkisar pada angka 0,13%. Sedangkan target pemerintah adalah sebesar 12% pada tahun 2024 untuk tercapainya sanitasi aman di Kota Bandar Lampung, maka masih ada gap sebesar 11,87% (SNV Indonesia, 2020).



Pengelolaan Air Bersih

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Visi Perumda Air Minum Way Rilau yakni mewujudkan pelayanan yang baik, efisiensi dalam pengelolaan. Melalui misi berupa menyediakan air bersih dengan standar kesehatan secara kontinyu dan merata, mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

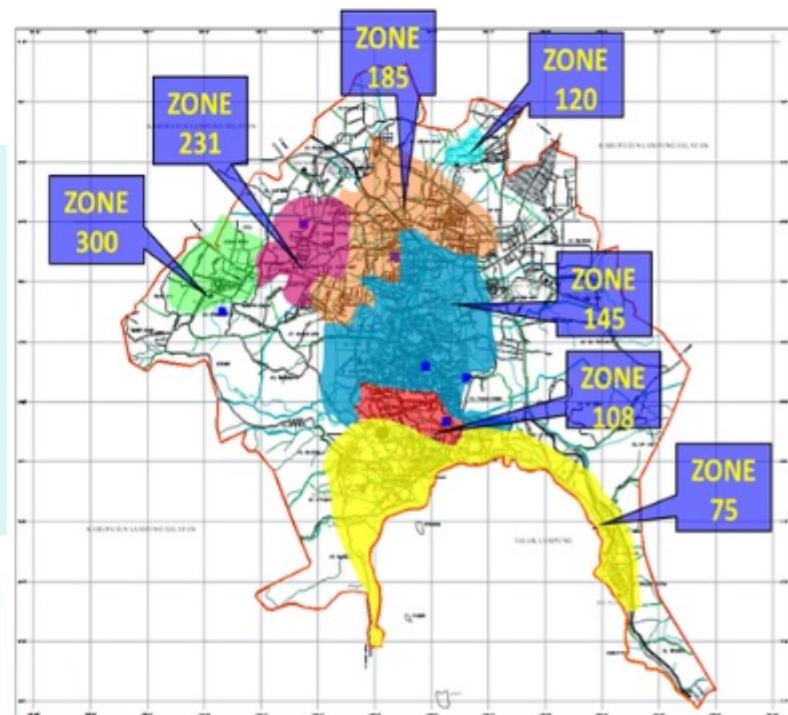
GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

PERUMDA AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	
1.	Jumlah Penduduk Terlayani 374,920 Jiwa
2.	Jumlah Kecamatan Terlayani 18 Kecamatan
3.	Cakupan Pelayanan 31,64 %
4.	Kapasitas Produksi Total 546,7 L/det

Data tahun 2022

Jumlah SR

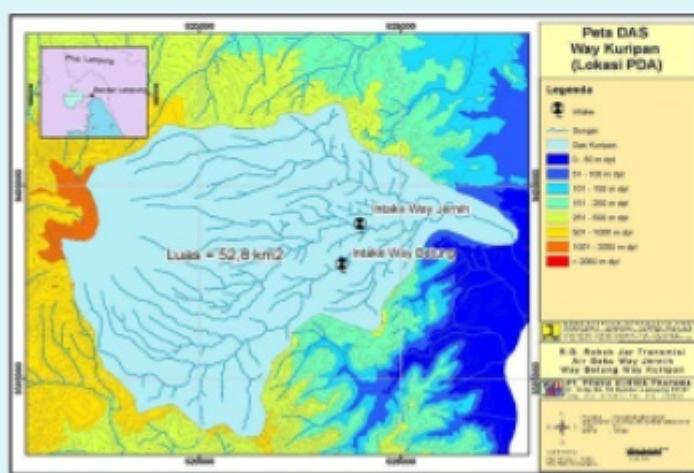
Total Sambungan Rumah 46.735 SR
(KPBU = 6.774 SR)



UNIT AIR BAKU

A. Air Permukaan

Sumber air baku dari air permukaan saat ini adalah Sungai Way Kuripan yang mempunyai daerah tangkapan (catchment area) seluas 52,80 Km²



Tabel Potensi Anak Sungai Way Kuripan

Daerah Pengaliran Sungai (DPS)	Luas (km ²)	Panjang Aliran (km)	Debit Andalan (l/d)	
			Q 95%	Q 99%
Way Kuripan/Way Belau	52,80	46,42	610	420
Way Simpang Kiri	52,80	46,42	610	420
Way Simpang Kanan	18,98	11,61	180	120
Way Betung	18,56	15,29	180	120
Way Jernih	16,90	14,72	160	100

B. Mata Air

Hasil inventarisasi mata air yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Way Rilau

No	Sumber Mata Air	Elevasi (mdpl)	Tahun Dibangun	Kapasitas Terpasang (l/d)	Kapasitas Produksi (l/d)
1	Tanjung aman	+366	1972	28.00	27.00
2	Way Rilau	+237	1937	32.00	30.00
3	Way Pancuran 1	+234	1986	15.00	14.00
4	Way Pancuran 2	+235	1997	15.00	14.00
5	Batu Putih 1	+227	1986	10.00	10.00
6	Batu Putih 2	+227	1997	10.00	10.00
7	Way Gudang	+250	1987	12.00	12.00
8	Way Linti 1	+247	1981	23.00	33.00
9	Way Linti 3	+245	1981	11.00	
10	Egaharap	+255	1920	10.00	9.00
11	Way Biak	+185	2006	6.00	4.7
Total				172.00	163.7

B. Air Tanah Dalam (Sumur Bor)

Data Air Tanah Dalam (sumur bor) yang ada saat ini dan masih berfungsi atau difungsikan

No.	Sumur Bor	Tahun Pembangunan	Kepasitas Terpasang (l/d)	Kapasitas Produksi (l/d)	Keterangan
1	Way Kandis 1	1996	5	1.5	SB-1
2	Way Kandis 3	1996	5	1.5	SB-3
3	BKP	2005	7	2	SB-1
4	Peternakan	2005	3	3	SB
5	Ega Harap	2010	7	7	SB
6	Perum Polda Kemiling	2011	8	8	SB
Total			35	23	



UNIT PRODUKSI

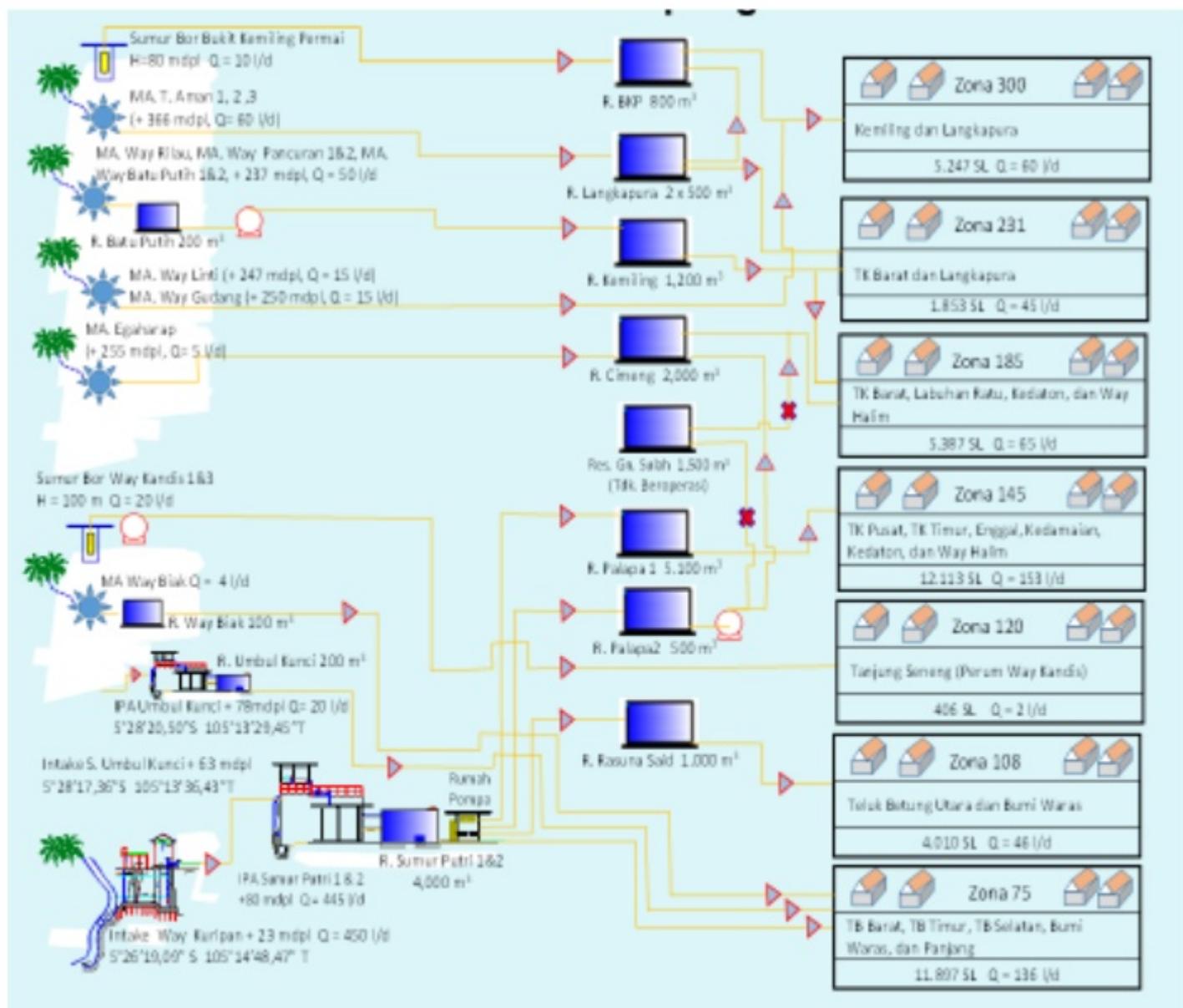


Data produksi air per unit produksi

No	Unit Produksi	Kapasitas	Kapasitas yang	Kapasitas
		Terpasang/Desain (l/dt)	Dapat Dimanfaatkan (l/dt)	Produksi (l/dt)
I	Air Permukaan			
1	IPA Sumur Putri 1	225	225	175
2	IPA Sumur Putri 2	225	225	177
3	IPA Umbul Kunci	20	20	8
	Jumlah I	470	470	360
II	Mata Air			
1	MA Batu Putih 1&2 + MA Pancuran 1&2 + MA Way Rileu	82	82	78
2	MA Way Linti 1 & 3	34	34	33
3	MA Way Gudang & Way Egaharap	22	22	21
4	MA Tanjung Aman	28	28	27
5	MA Way Biak	6	6	4.7
	Jumlah II	172	172	163.7
III	Air Tanah			
A	Sumur Bor Zona 120			
1	SB Way Kandis 1	5	5	1.5
2	SB Way Kandis 3	5	5	1.5
	Jumlah III A	10	10	3
B	Sumur Bor Zona 185			
1	SB Peternakan	3	3	3
2	SB Egaharap (Cimeng)	3.5	3.5	3.5
	Jumlah III B	6.5	6.5	6.5
C	Sumur Bor Zona 300			
1	SB BKP 1			0.5
2	SB BKP 2	7	7	0.5
3	SB BKP 3			0.5
4	SB BKP 4			0.5
5	SB Egaharap (POLDA)	3.5	3.5	3.5
6	SB POLDA 2	8	8	8
	Jumlah III C	18.5	18.5	13.5
	Jumlah III	35	35	23
	TOTAL	677	677	546.7



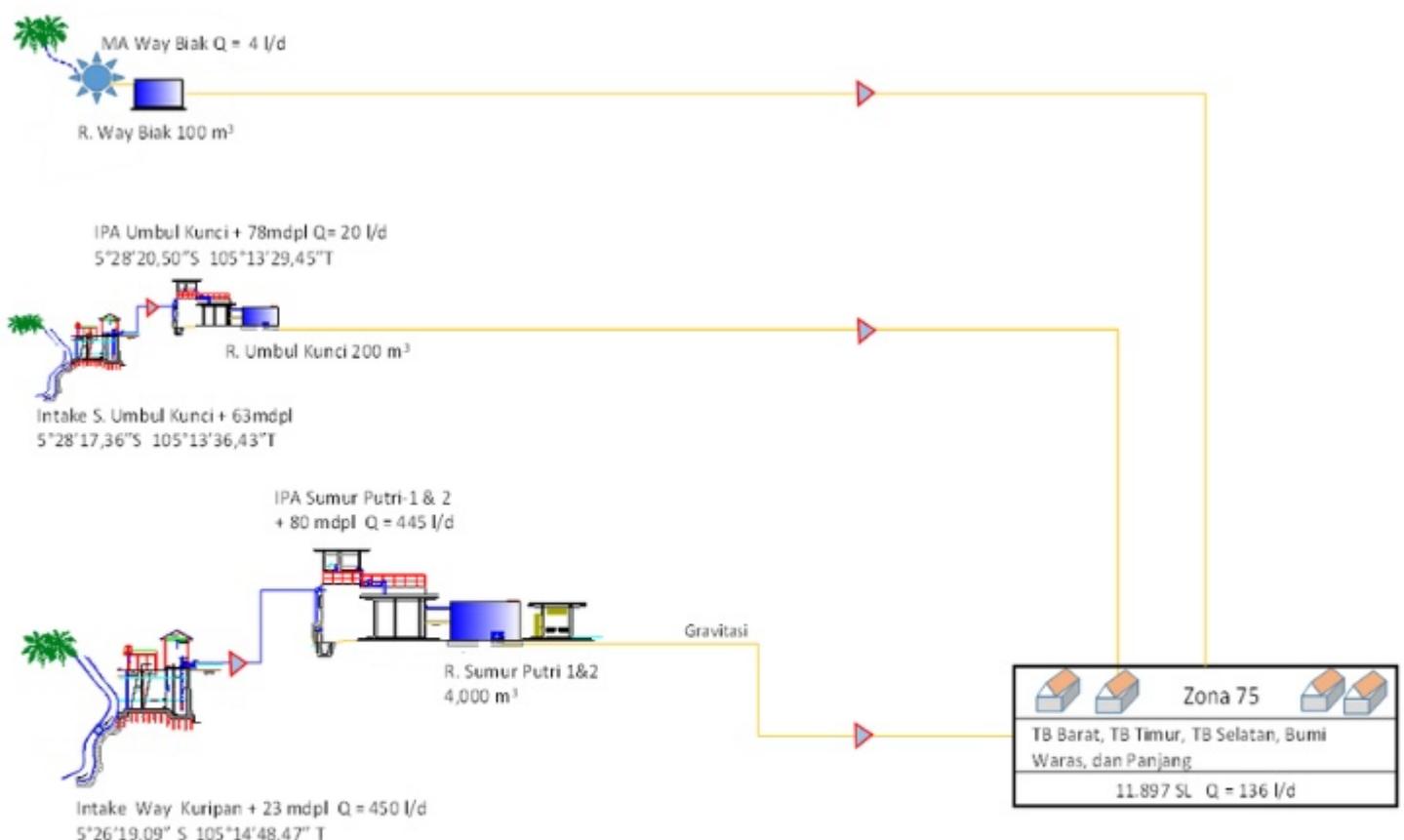
SKEMATIK SPAM EKSISTING PERUMDA AIR MINUM





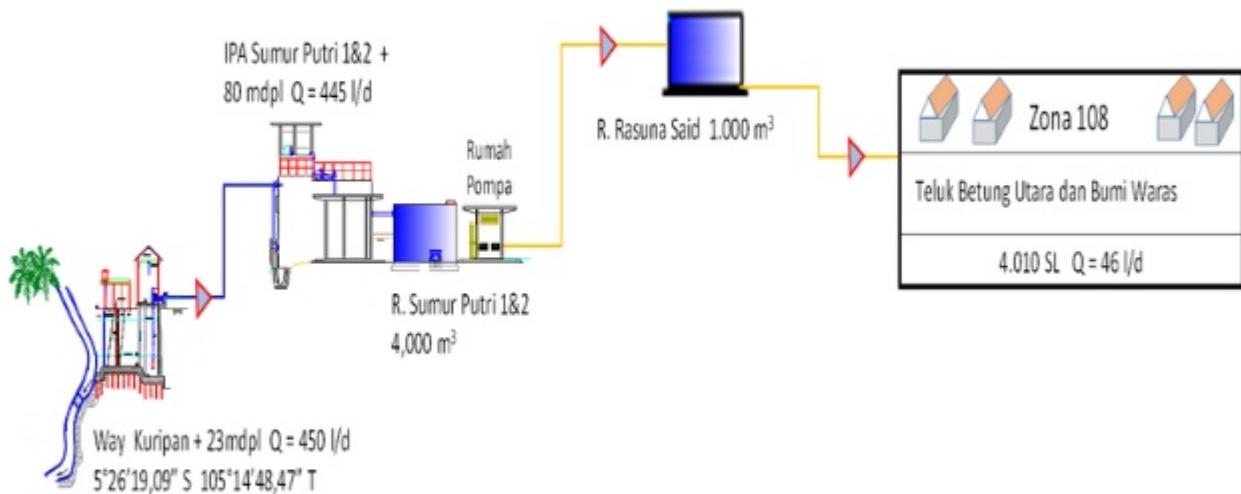
1, ZONA 075

Melayani Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras dan Panjang. Sumber air untuk zona 075 berasal dari reservoir induk IPA Sumur Putri 1 dan 2. Pengaliran ke wilayah pelayanan dilakukan secara gravitasi dari reservoir sumur putri



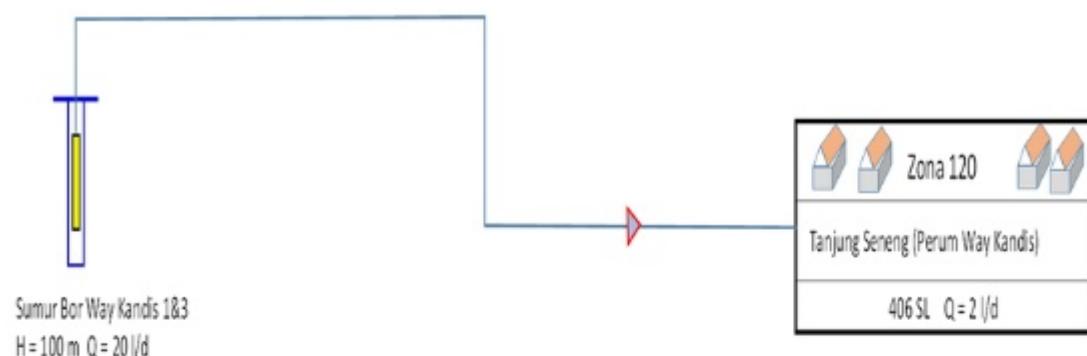
II. ZONA 108

Melayani Kecamatan Teluk Betung Utara dan sebagian Kecamatan Bumi Waras. Sumber air untuk zona 108 berasal dari Reservoir Rasuna Said yang mendapat pasokan air dengan cara pemompaan dari Reservoir Sumur Putri. Pengaliran ke wilayah pelayanan dilakukan secara gravitasi dari Reservoir Rasuna Said.



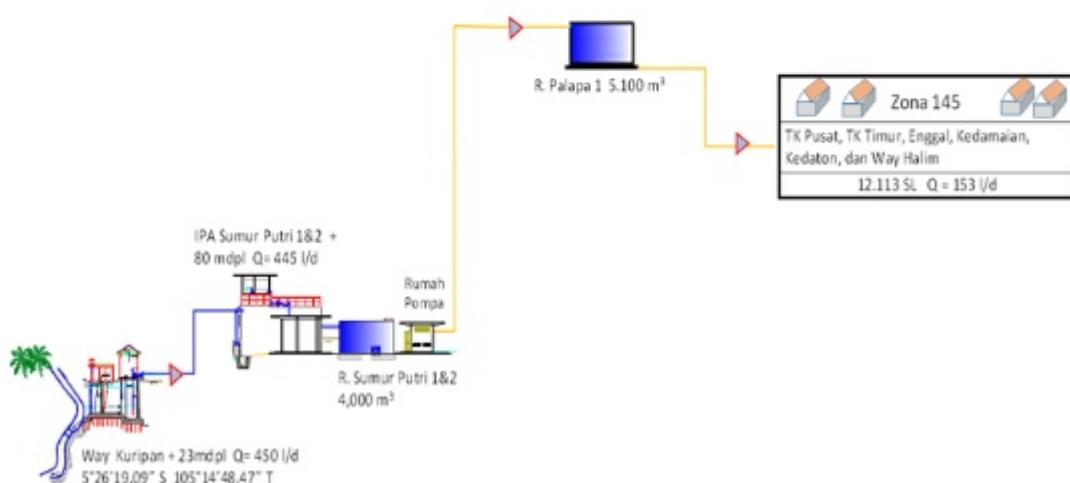
III. ZONA 120

Melayani Kecamatan Tanjung Senang tepatnya Perumahan Way Kandis. Sumber air untuk zona 120 berasal dari Sumur Bor Way Kandis 1 dan 2 dengan masing-masing debit perencanaan 5 liter/detik. Pengaliran ke wilayah pelayanan dilakukan dengan cara pemompaan langsung dari sumur bor



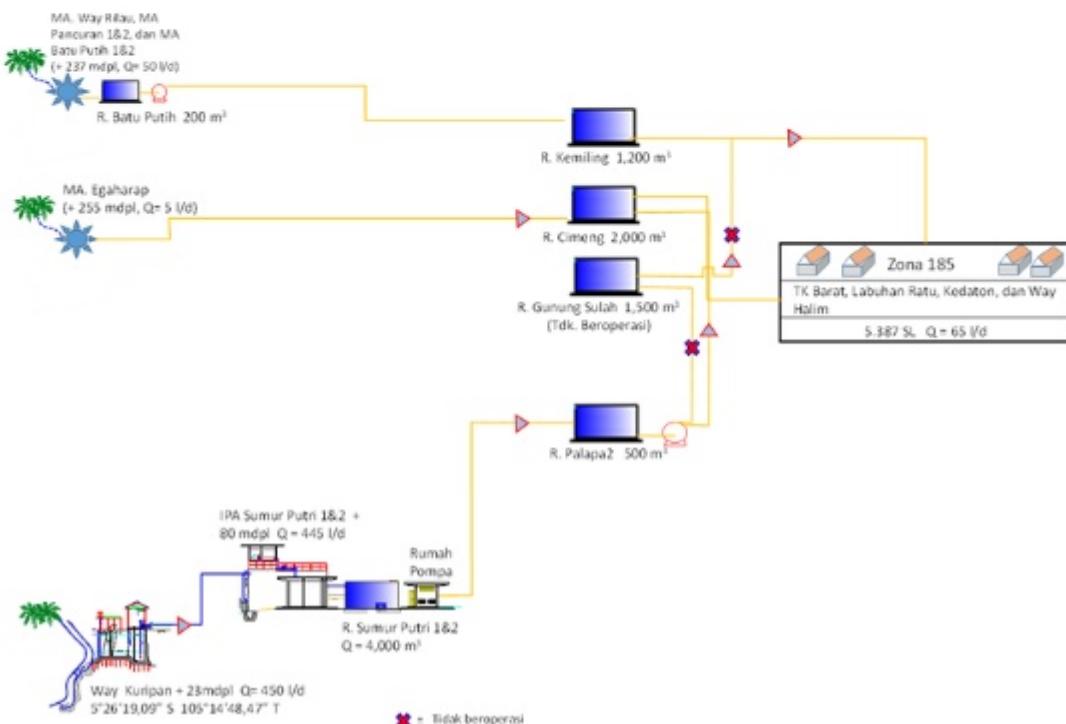
IV. ZONA 145

Melayani Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang timur, Enggal dan sebagian Kedamaian, Kedaton serta Way Halim. Sumber air untuk zona 145 berasal dari Reservoir Palapa 1. Pengaliran ke wilayah pelayanan dilakukan secara gravitasi dari Reservoir Palapa 1.



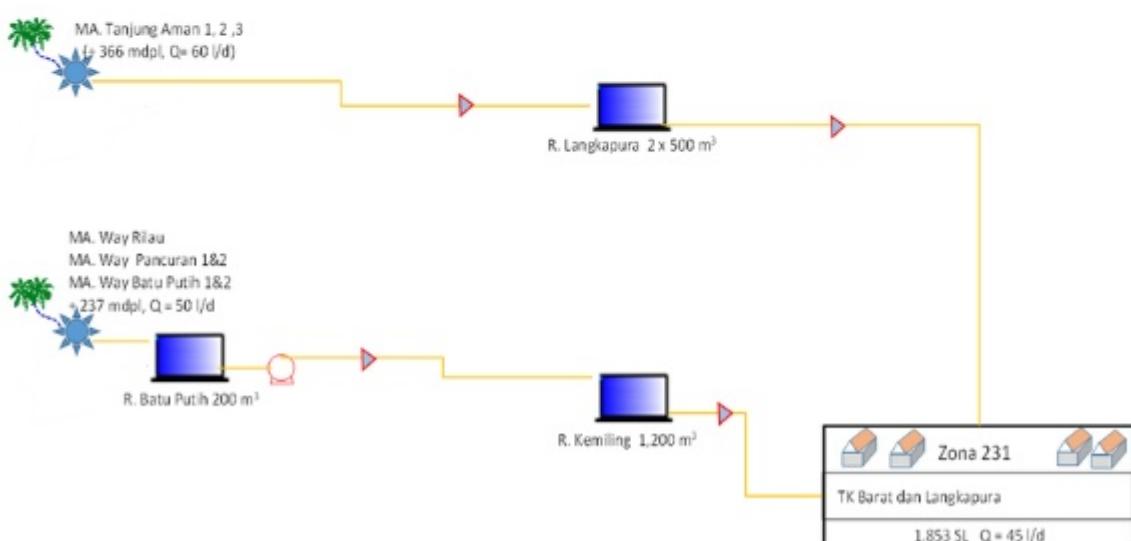
V. ZONA 185

Melayani Kecamatan Tanjung Karang Barat, Labuhan Ratu dan sebagian Kedaton serta Way Halim. Sumber air untuk Zona 185 berasal dari Reservoir Palapa Cimeng dan Reservoir Palapa 2. Reservoir Cimeng mendapatkan pasokan air secara gravitasi dari mata air Way Gudang. Mata Air Way Linti 1 dan 2, Mata Air Ega Harap. Sedangkan reservoir Palapa 2 mendapatkan pasokan air dengan cara pemompaan dari reservoir sumur putri. Selain itu sumber air Zona 185 juga dari 2 unit sumur bor.



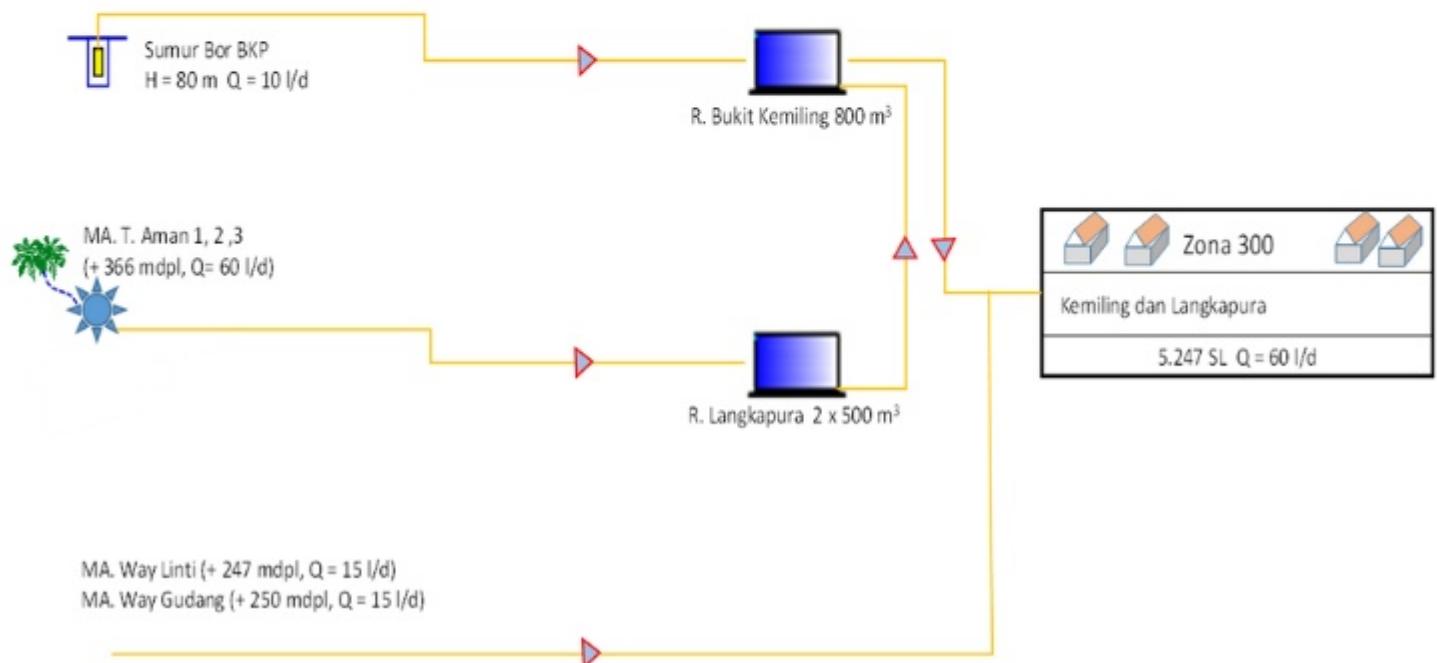
VI. ZONA 231

Melayani Kecamatan Langkapura dan sebagian Kecamatan Langkapura dan sebagian Kecamatan Tanjung Karang Barat. Sumber air untuk Zona 231 berasal dari Reservoir Kemiling yang mendapat pasokan air dari mata air Pancuran 1 dan 2. Mata air batu putih 1 dan 2 serta mata air dari Way Rilau. Pengaliran ke wilayah pelayanan dilakukan secara gravitasi dari Reservoir Kemiling

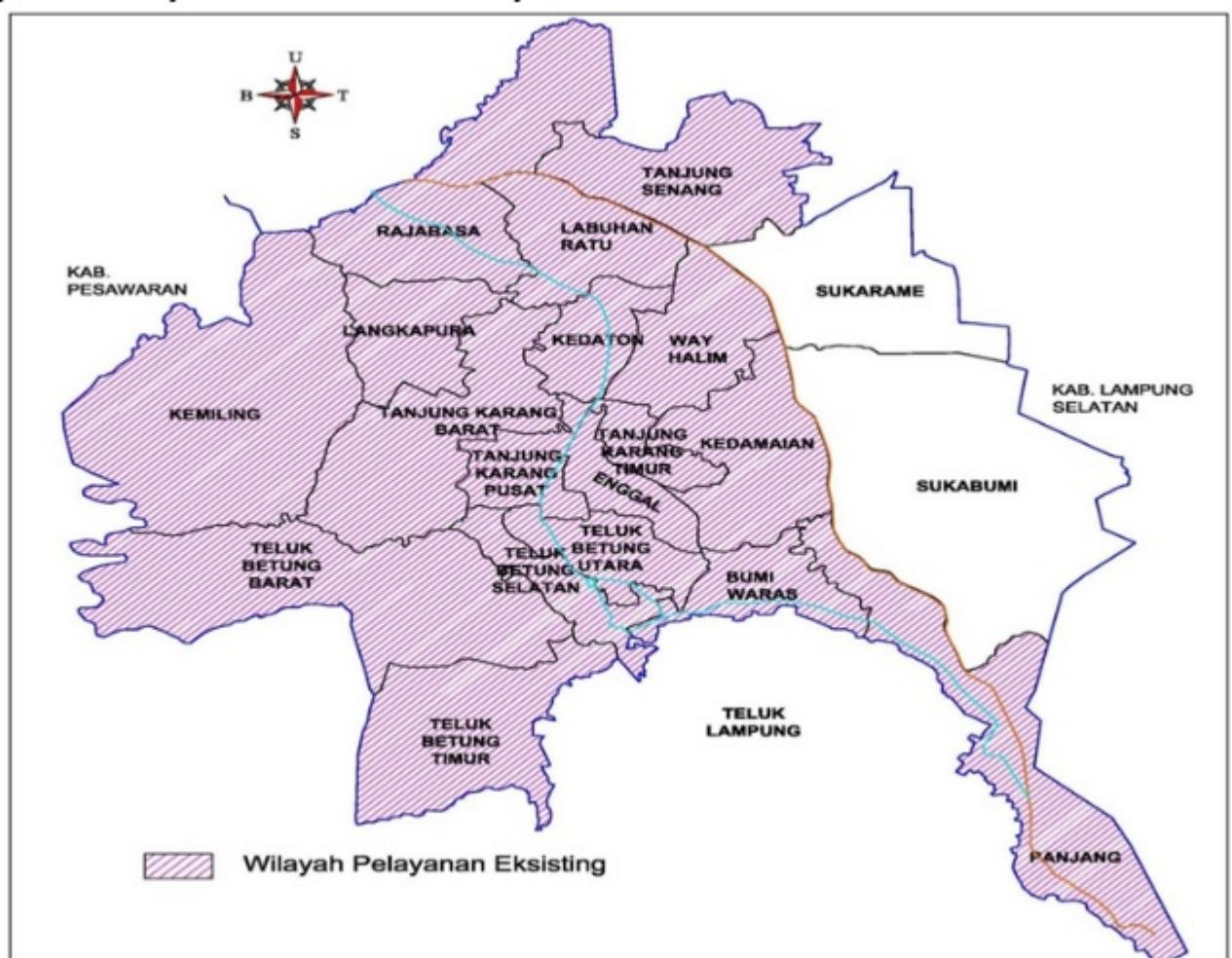


VII. ZONA 300

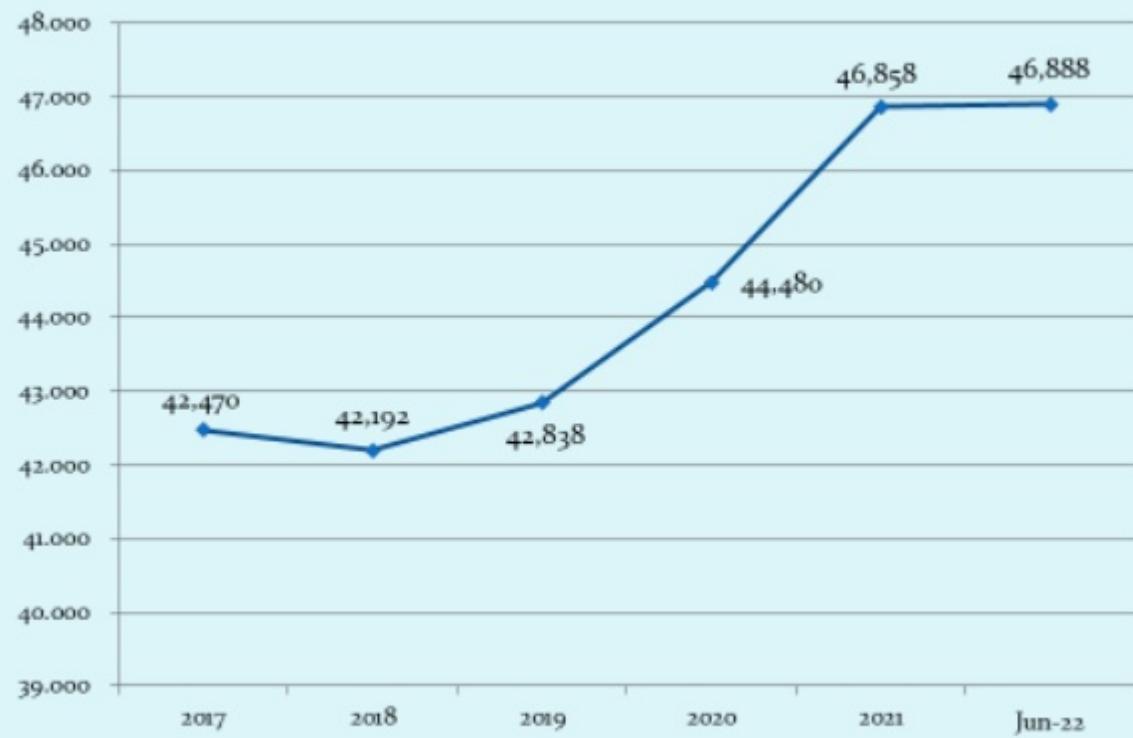
Melayani Kecamatan Kemiling dan sebagian Kecamatan Langkapura. Sumber air untuk zona 300 berasal dari reservoir Bukit Kemiling Permai (BKP), reservoir Langkapura 1 dan 2 serta pemompaan langsung dari SB Egaharap dan SB Polda. Reservoir BKP mendapat pasokan air dengan cara pemompaan dari SB BKP 1, 2 dan 3. Reservoir Langkapura 1 dan 2 mendapat pasokan air dari mata air Tanjung Aman secara gravitasi



Wilayah Pelayanan PDAM Way Rilau



Grafik Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2017 – Juni 2022

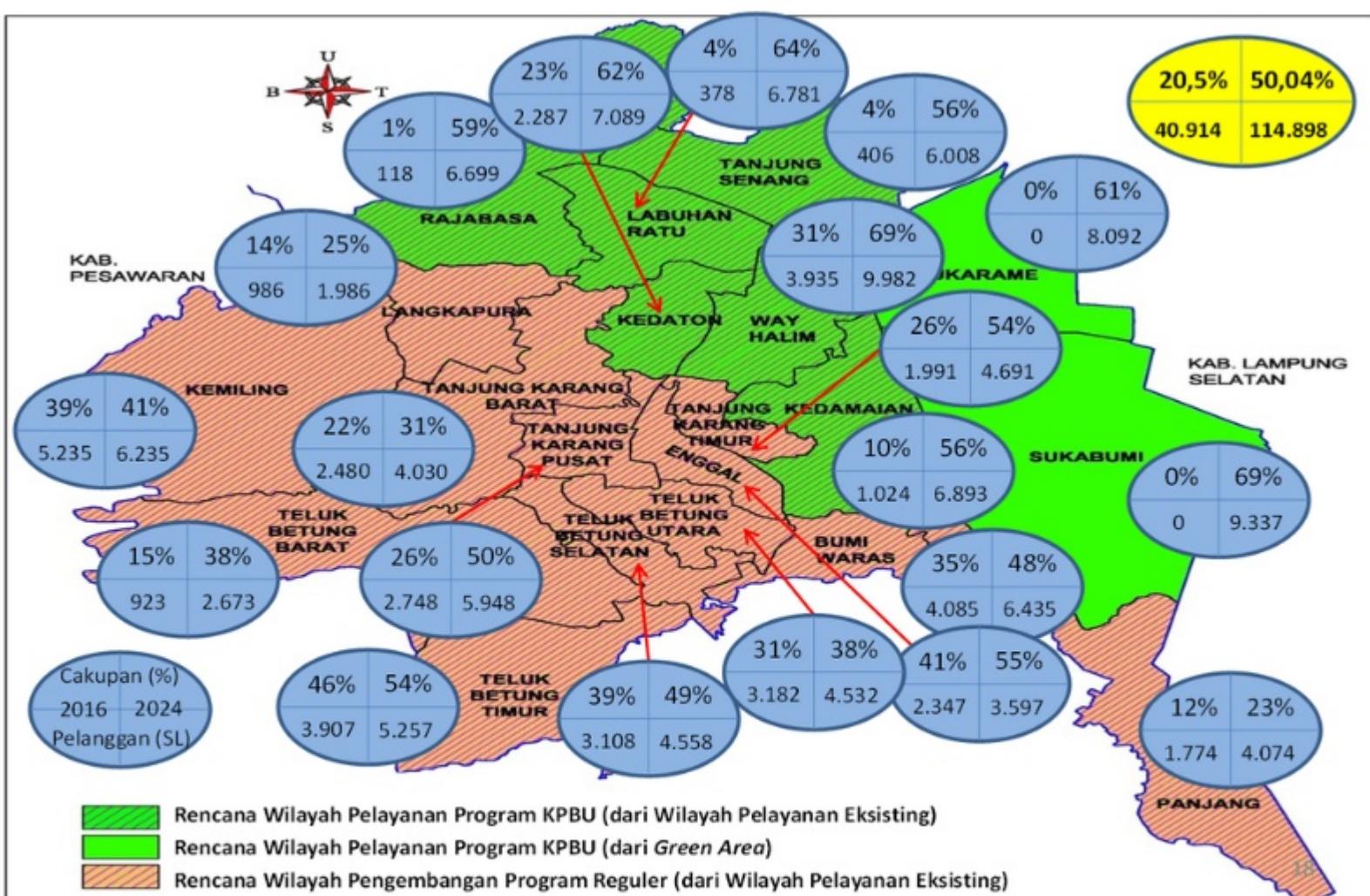


Rencana Pengembangan Wilayah Pelayanan SPAM Kota Bandar Lampung 2017 – 2024





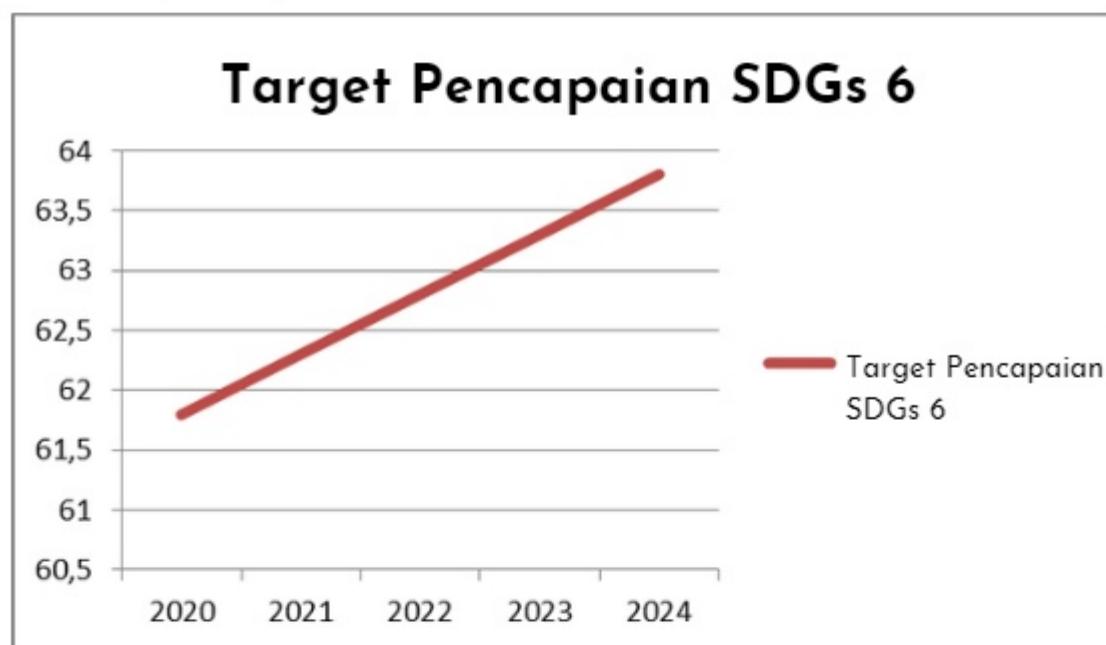
Peta Rencana Pengembangan SPAM Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2024



Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Dalam Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs Indonesia, Kota Bandar Lampung memiliki kontribusi dalam Tujuan 6 (enam) yaitu "Air Bersih dan Sanitasi Layak" dengan Target 6.1 yaitu "mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua" dan Target 6.2 yaitu "mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan di tahun 2030". Target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencapai hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.5 di bawah ini.

Grafik 2.5 Target Pencapaian SDGs 6



(Sumber: Dinas PU Kota Bandar Lampung, 2020)

Dari Grafik 2.6 di atas terlihat target pencapaian Kota Bandar Lampung dalam indikator rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman adalah 63,8% di tahun 2024 dan target rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun sebesar 62% ditahun 2024. Kedua target capaian tersebut jauh di atas angka dasar (*baseline*). Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Kota Bandar Lampung dalam mencapai Tujuan 6 (enam).

Penerapan SDG's

Pemetaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Permendagri no 87 tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi berupa pelatihan tukang untuk tangki septik berdasarkan SNI dan tahan banjir, SOP pelayanan, penilaian kinerja operator dan pengembangan *business model* untuk perusahaan daerah kebersihan
2. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan berupa mendorong penyusunan naskah akademik peraturan daerah air limbah domestik ke perangkat daerah dan institusi terkait (puskesmas, universitas, masyarakat dan sebagainya), fasilitasi tarif review layanan sanitasi, sosialisasi peraturan daerah air limbah domestik
3. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah berupa penyusunan SOP IPLT, pendampingan teknis dan penyusunan dokumen *readiness criteria* untuk penganggaran perbaikan IPLT bakung, fasilitasi operasional unit pengolahan baru (jaringan listrik), peningkatan kapasitas kader PKK, tokoh agama, sanitarian.
4. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi berupa riset formatif perilaku sanitasi dan kebersihan, pelatihan komunikasi perubahan perilaku (KPP), produksi dan distribusi materi komunikasi keamanan dan edukasi (KIE), penerbitan SK tim KPP, Kampung Hijau, penyusunan dan sosialisasi strategi KPP kota.
5. Pengembangan kerjasama dan pola pendanaan berupa pelatihan pengembangan bisnis wirausaha sanitasi dan dialog dengan pemangku kepentingan.

Penerapan SDG's

Capaian utama pemerintah Kota Bandar Lampung dalam peningkatan perubahan perilaku kebersihan dan sanitasi aman adalah sebagai berikut:

1. Mendorong proses partisipatif untuk menghasilkan strategi komunikasi perubahan perilaku Kota Bandar Lampung menuju sanitasi aman berupa berhasil membuat materi komunikasi yang menarik, relevan, berkreasi dan inovatif serta dapat diterima secara sosial budaya
2. Penerbitan SK Tim Komunikasi Perubahan Perilaku terdiri dari berbagai dinas terkait untuk mendorong perubahan perilaku dimasyarakat menuju sanitasi aman dan perilaku bersih sehat
3. Pilot kampung hijau di 6 (enam) kelurahan untuk komunikasi perubahan perilaku meningkatkan layanan sanitasi dan perilaku cuci tangan pakai sabun (CPTS), menghasilkan kelompok arisan sedot tinja, kelompok penghijauan lingkungan dan kelompok bank sampah untuk sedot tinja
4. Advokasi dan pendampingan teknis dan pembaharuan IPLT Bakung dengan menggunakan teknologi mekanis di Kota Bandar Lampung
5. Meningkatkan kapasitas penyedia jasa konstruksi tangki septik dan pengusaha sanitasi untuk membangun tangki septik SNI dan mampu memasarkan produk sanitasi
6. Puskesmas berhasil menggunakan alat pemantauan global nasional dan melakukan perbaikan melalui pembentukan tim pemantau di tingkat puskesmas, membuat sarana toilet dan cuci tangan yang inklusif, mengajak kelompok rentan dalam diskusi dan sebagainya
7. Uji coba lapangan upaya penggunaan kembali lumpur tinja terolah menjadi pupuk organik dengan vermicomposting
8. Penyusunan, pelatihan dan uji coba SOP IPLT bakung bersama Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Tapis Berseri untuk memastikan operasional dan pemeliharaan IPLT optimal
9. Melakukan kajian tarif pengelolaan air limbah domestik dan rekomendasi pemulihhan biaya termasuk biaya operasional, investasi masa depan dan rencana bisnis
10. Mendorong pembentukan dan penyediaan pendanaan alternatif berbasis masyarakat untuk pembangunan tangki septik standar dan sedot tinja.
11. Bersama kelompok perempuan membentuk arisan sedot tinja (ARSETI) dengan kelompok pemuda membentuk bank sampah untuk sedot tinja, terutama di lokasi kampung hijau

Tujuan ke 6 Air bersih dan Sanitasi Layak

Tantangan Dalam Mewujudkan Sanitasi Aman dan Layak yaitu :

Diantaranya adalah bencana perubahan iklim, tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, cakupan akses pelayanan yang masih rendah, menurunnya water security dan pencemaran air, penyediaan infrastruktur yang belum optimal, serta alokasi pendanaan belum sesuai kebutuhan.



Tujuan 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua orang serta menekankan bahwa inklusif merupakan salah satu aspek kunci dalam pemenuhan pelayanan sanitasi, termasuk di dalam lingkungan sekolah (pendidikan) di SDGs Tujuan 4. Penyajikan temuan utama mengenai kondisi aksesibilitas sanitasi inklusif dan diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya aksesibilitas sanitasi di sekolah yang inklusif untuk seluruh anak termasuk juga anak dengan disabilitas di Kota Bandar Lampung.







TPB 13 #PERUBAHAN IKLIM

“Goal 13 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang.”

Selanjutnya tentang Tujuan 13 tentang perubahan iklim. Berikut merupakan Grafik Suhu Maksimum Bulanan Tahun 2021 - 2023 dan Suhu dengan grafik yang melonjak tinggi berada di bulan November pada tahun 2022 yaitu sebesar 37 derajat celcius. Sedangkan suhu dengan derajat terendah berada pada bulan Januari tepatnya pada Tahun 2021.

Grafik 2.6 Suhu Maksimum Bulanan Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 - 2023



Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah Program Kampung Iklim (Proklim) di 15 kabupaten dan kota daerahnya guna mengurangi dampak perubahan iklim serta mengantisipasi potensi bencana. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah telah mencanangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan perubahan iklim dengan berbagai upaya. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Saat ini ada beberapa dampak perubahan iklim yaitu adanya bencana seperti hidrometeorologi, kerusakan ekosistem akibat perubahan segala macam. Dan melalui Proklim (Program Kampung Iklim) menjadi salah satu caranya.



Tabel 2.7 Rata-rata Suhu Udara (Celcius) Tahun 2020 - 2022

Bulan	Rata-rata Suhu Udara (Celcius)		
	2020	2021	2022
Januari	27.17	26.20	34.20
Februari	27.22	26.50	34.40
Maret	27.40	27.10	34.60
April	27.35	27.50	35.20
Mei	27.62	27.80	35.00
Juni	26.71	27.20	34.20
Juli	26.45	26.80	33.40
Agustus	27.02	27.00	34.20
September	27.40	27.10	34.00
Oktober	27.50	27.90	34.40
November	27.36	27.30	35.00
Desember	26.71	27.20	33.60

Sumber: Stasiun Meteorologi Raden Intan II Bandar Lampung

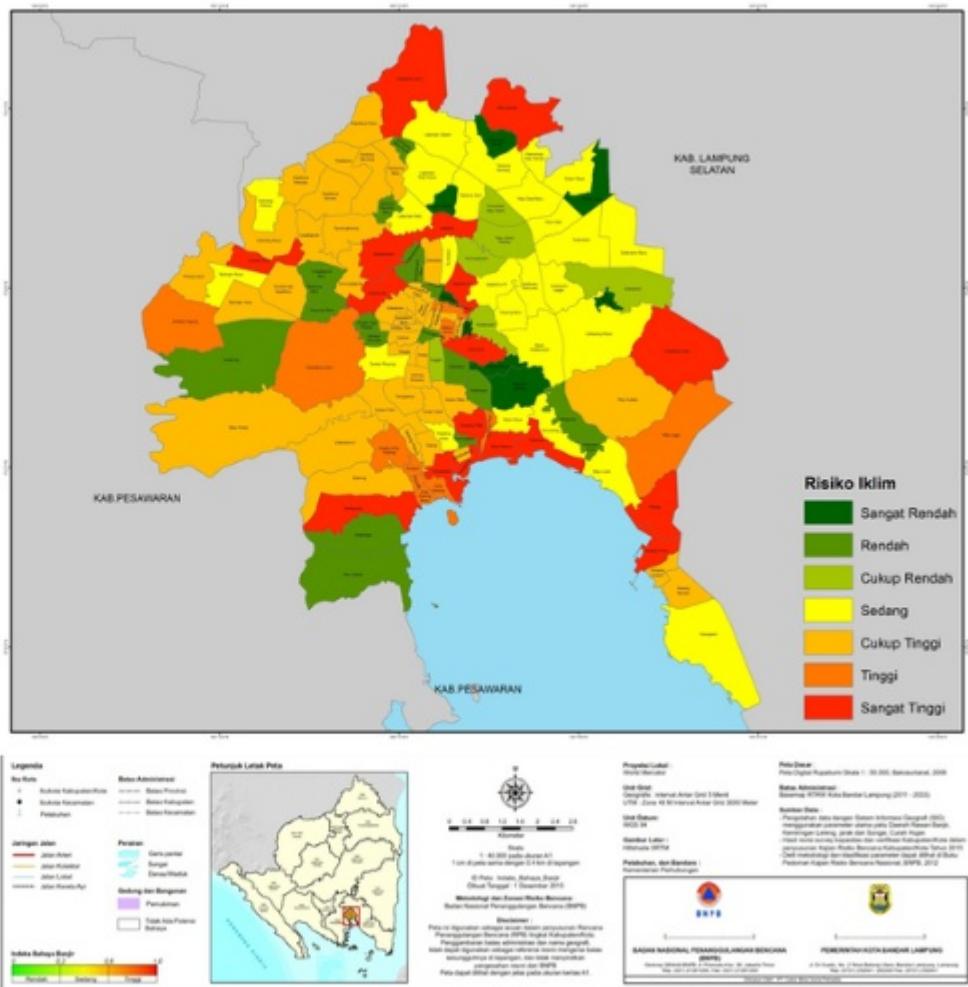
Tabel diatas merupakan Tabel Rata - rata Suhu Udara pada Tahun 2020 -2022 bisa dilihat pada tabel tersebut Suhu dengan nilai rata - rata terendah terjadi pada bulan Januari di Tahun 2021 yaitu sebesar 26.20 derajat celcius sedangkan Suhu udara tertinggi terdapat pada bulan April di Tahun 2022 yaitu sebesar 35.20 derajat celcius. Jika dilihat dari naik turunnya angka Rata - Rata pertahun mengalami kenaikan.

URBAN ANALYSIS REPORT 2020

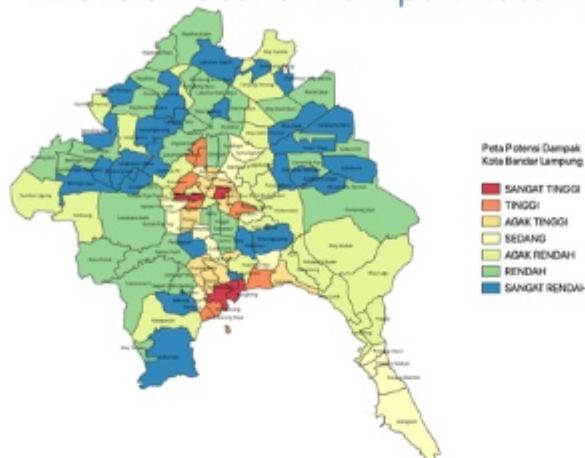
BANDAR LAMPUNG

01

Urban Resilience



Analisis Potensi Dampak Kota Bandar Lampung



POTENSI DAMPAK	JUMLAH KELURAHAN
Sangat Rendah	28
Rendah	30
Agak Rendah	27
Sedang	16
Agak Tinggi	12
Tinggi	8
Sangat Tinggi	5
Total Kelurahan	126

- Terdapat **5 Kelurahan** (Kangkung; Kelapa Tiga; Sawah Lama; Telukbetung; Pesawahan) yang berada pada **Potensi Dampak** kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan Indeks Kerentanan dan Keterpaparan yang tinggi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Point 13 yaitu penanganan perubahan iklim (*climate action*) Pemerintah Kota Bandar Lampung menanggulangi persentase korban bencana alam yang berhasil di tangani Tahun 2021 sebesar 100%, begitu pun di Tahun 2022 juga sebesar 100%. Mendekripsi indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyentuh angka sebesar 62,98 Tahun 2021 dan mengalami penurunan Tahun 2022 sebesar 58,86.

Tujuan 13 Peningkatan Ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah Kota Bandar Lampung, bekerjasama dengan Mercy Corps, melalui program ACCCRN melakukan upaya-upaya yang bertujuan membangun ketahanan kota Bandar lampung terhadap Perubahan Iklim. Proses membangun ketahanan terdiri dari beberapa proses utama yang menyasar kepada penguatan kelembagaan, kajian kerentanan, strategi ketahanan kota dan menjalankan berbagai aksi adaptasi. Semua pihak di Kota Bandarlampung penting untuk melipatgandakan komitmen guna ketahanan kota dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Sayangnya, masih terdapat kelemahan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan persoalan kompleks climate change ini ke dalam perencanaan pembangunan jangka-panjang.

FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. FOLU Net Sink 2030 terdiri atas Rencana Operasional sebagai tindak lanjut Perpres 98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta Kepmen 168 Tahun 2022 tentang Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim. Selanjutnya Kementerian LHK juga telah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah. Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis KLHK dalam keberhasilan implementasi FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak. Selain itu, dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikkan dan menyebarluaskan tujuan positif FOLU Net Sink 2030 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim saat ini untuk masa depan.



Penerapan SDG's

Program Perubahan Iklim yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu dengan (SIGN SMART) Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Dengan Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan. SIGN SMART dibangun pada akhir tahun 2014. Sistem ini dibuat untuk mengelola data dan estimasi emisi GRK dengan sistem basis data yang terintegrasi. Yang didesain untuk mendukung transparansi, akurasi, konsistensi, berkesinambungan, dan untuk inventarisasi emisi GRK. Sistem ini dapat diinput oleh siapa saja, kapan saja dan dapat diakses via online maupun offline.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan uclg aspac terkait peningkatan kapasitas penanganan isu perubahan iklim dengan memperhatikan aspek inklusivitas dalam pembangunan perkotaan.

Saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung sedang menyusun dokumen rencana aksi iklim yang selaras dengan tujuan dan komitmen nasional serta undang-undang nomor 16 tahun 2016 tersebut. Dokumen rencana aksi iklim tersebut terdiri dari komponen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Saat ini telah diidentifikasi dari 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung terdapat 5 (lima) kelurahan berada pada kategori dampak perubahan iklim sangat tinggi (Kelurahan Kangkung, Kelurahan Kelapa Tiga, Kelurahan Sawah Lama, Kelurahan Pesawahan, Kelurahan Teluk Betung)

Selanjutnya, di bulan agustus tahun 2023 ini akan dilakukan inventarisasi gas rumah kaca untuk mengetahui profil emisi gas rumah kaca di Kota Bandar Lampung yang dapat menjadi dasar acuan penentuan aksi mitigasi perubahan iklim di Kota Bandar Lampung

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Di masa depan, perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemansan global diperkirakan akan menciptakan pola - pola risiko baru, dan risiko yang lebih tinggi secara umum. Kenaikan permukaan laut akibatnya mencairnya glester dan es kutub dan ekspansi termal akan memberikan kontribusi pada peningkatan banjir pesisir. Bandar Lampung sebagai kota pesisir akan terpengaruh secara serius oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.

Kota Bandar Lampung sangat rawan terhadap bencana alam. Jenis bencana alam yang melanda Kota Bandar Lampung meliputi Banjir, tanah longsor, air pasang menyababkan rob, tsunami, gempa bumi dan kekeringan. Juga terdapat resiko abrasi, erosi dan sedimentasi yang terjadi di wilayah pesisir.

Pada lingkungan perkotaan dengan pemukiman yang padat dan halaman rumah dengan betonisasi atau aspal (berbeda dengan paving block yang menyisakan ruang untuk air meresap) menyebabkan aliran air (hujan) tidak terserap oleh tanah, hal tersebut diperparah dengan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk serta macetnya saluran alir (drainase).

Semua level pemerintahan baik di tingkat pusat hingga ke daerah perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim ke dalam rencana program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai persoalan besar seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan, semuanya harus ditinjau ulang dari perspektif perubahan iklim. Tantangannya adalah bagaimana membuat perencanaan pembangunan yang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan pembangunan manusia harus dievaluasi dan dipetakan, selanjutnya strategi adaptasi harus diintegrasikan dalam rencana dan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.





Wisata Sumur Putri Kota
Bandar Lampung



Bab 3

Nilai dan Konten Pembangunan

RAD SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 merupakan salah satu dasar utama dalam melihat progres pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Progress pencapaian target-target SDGs di Kota Bandar Lampung dicoba untuk didokumentasikan dalam dokumen VLR ini walaupun tidak semua tujuan dalam SDGs dapat terliput progresnya. Data indikator yang dapat dikumpulkan serta dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs tertentu merupakan dasar dari penyusunan dokumen VLR ini. Elaborasi progres dilakukan dengan menggunakan kriteria empat Pilar Pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Bappenas.

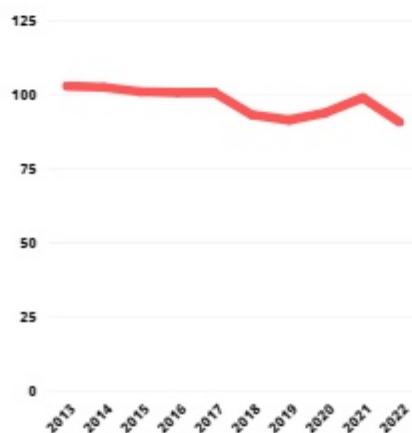


THE GLOBAL GOALS

Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Tanpa Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, mendata garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013 sebesar 100,75%, dan pada Tahun 2014 sebesar 102,27% data ini menunjukkan penurunan signifikan, kemudian pada Tahun berikutnya 2015 tercatat sebesar 100,80% dan pada Tahun 2016 sebesar 100,54%, angka kemiskinan ini terus menurun, sama hal nya pada Tahun 2017 mencapai 100,50%. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, mendata garis kemiskinan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018 yaitu sebesar 93,04%.

BPS Kota Bandar Lampung mencatat pula bahwa angka kemiskinan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 sebesar 91,24% dan masih mengalami penurunan 2020 sebesar 93,74%, pada Tahun 2021 penurunan angka kemiskinan Kota Bandar Lampung semakin rendah yaitu sebesar 98,76% dan tercatat Tahun 2022 sebesar 90,51%, angka kemiskinan Kota Bandar Lampug menunjukkan lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional.



Pemerintah Kota Bandar Lampung berkoordinasi membentuk Tim Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang membahas tentang target, sasaran, dan sinergi program dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung termasuk program bantuan yang telah dilaksanakan selama Pandemi Covid-19.

Program penanggulangan kemiskinan ini memiliki tujuan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun program bantuan yang telah dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 :

1. Bantuan sosial berupa paket sembako dan uang tunai, disalurkan sejak pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia
2. BLT Dana Desa
3. Listrik Gratis
4. Kartu Prakerja, diberikan pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran
5. Bantuan Subsidi Gaji bagi karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta.



Kota Bandar Lampung menjadi rumah bagi 60.696 Unit UMKM yang turut berkontribusi terhadap perekonomian dan penyediaan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung sekaligus penggerak 75% roda perekonomian Kota. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil peran aktif untuk memberikan stimulus terhadap pengembangan kewirausahaan secara terpadu, dengan membangun Taman UMKM Bung Karno.

Melalui Taman UMKM Bung Karno para pelaku usaha merajut asa, pasalnya banyak lapak UMKM yang menawarkan berbagai produksi mulai dari berbagai wisata kuliner, produk olahan sekala mikro, hingga kerajinan tangan dan souvenir.

Selain membangun Taman UMKM, pemerintah kota Bandar Lampung membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuka peluang bagi koperasi untuk mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga. Hal tersebut untuk memudahkan pelaku UMKM dan koperasi di Bandar Lampung terus berkembang. Koperasi bisa mendapatkan pinjaman modal mulai dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Koperasi hanya perlu membayar pinjaman pokok, sedangkan bunganya ditanggung pemerintah.

Bukan hanya itu, pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia cabang Bandar Lampung untuk pelaku UMKM dalam pemasaran produk usaha secara online, sehingga dapat membantu pelaku UMKM untuk mebgembangkan jaringan usaha secara luas dan cepat. Kemudian PT. Pos Indonesia cabang Kota Bandar Lampung Telah memberikan bantuan berupa uang sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk para pelaku UMKM.

Sebagian besar UMKM sudah menerapkan digitalisasi baik dari sisi pembayaran perbankan, dompet digital, internet banking dan sebagainya. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyarankan agar pelaku UMKM mulai memasarkan produknya melalui digital. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing melalui literasi digital. Dari segi pemasaran juga para pelaku UMKM sudah memakai platform market place yang ada kemudian melalui media sosial.

UMKM mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka pengembangan UMKM diyakini dapat memperluas lapangan kerja, kesempatan usaha, dan pemulihan ekonomi warga.

Taman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bung Karno di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, dibangun guna mempromosikan produk-produk pelaku UMKM. Secara resmi, taman UMKM Bung Karno sekarang telah resmi dibuka dan diharapkan akan menjadi tempat wisata kuliner yang ada di Bandar Lampung. Sepanjang jalan Gatot Subroto itu terdapat 400 pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya. Adanya wisata kuliner di Taman UMKM Bung Karno ini, merupakan salah satu upaya pemerintah juga dalam mempromosikan Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung didorong menjadi kota kreatif dengan keunggulan produk kriya, busana, dan kuliner. UMKM diharapkan mampu menangkap momentum kebangkitan pariwisata untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Di tengah bangkitnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan nasional.



Praktik Baik Pemerintah PLN peduli light up the dream

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung melalui program *Light Up The Dream* telah menyalakan sambungan listrik gratis untuk 429 keluarga kurang mampu yang berada di Provinsi Lampung, sejak Januari hingga Agustus 2023. Sedangkan, pada bulan Agustus 2023 yang juga bertepatan pada peringatan HUT RI ke-78



sendiri, program *Light Up The Dream* menyalakan sambungan listrik gratis sebanyak 15 keluarga. Program yang digagas oleh para pegawai PLN dengan mendonasikan sebagian penghasilannya guna membantu penyambungan baru listrik PLN secara gratis untuk masyarakat kurang mampu. General Manager PLN UID Lampung, mengatakan *Light Up The Dream* yang digagas oleh para pegawai PLN ini sebagai wujud keberhasilan penerapan budaya Akhlak yang telah berjalan selama 3 tahun di PLN. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan salurkan bantuan pembayaran listrik masjid yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut merupakan program terbaru dan bentuk perhatian Pemkot Bandar Lampung terhadap masjid di Bandar Lampung. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung mengatakan, pemerintah kota memberikan subsidi listrik untuk masjid, satu bulan sebesar Rp 1 juta. Bantuan pembayaran yang akan disalurkan, merupakan bantuan untuk periode 2022-2023, atau dari Oktober 2022 hingga Desember 2023. Total yang akan disalurkan untuk 15 bulan atau Rp 15 juta setiap masjid akan mendapat bantuan pembayaran listrik. Bantuan pembayaran rekening listrik masjid diberikan untuk 707 masjid yang ada di Kota Bandar Lampung.



Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Kehidupan sehat dan sejahtera

Walikota Bandar Lampung Ikut Serta dalam Clean Up Pantai (membersihkan pantai) bersama Komunitas Pandawara dan Pemerintah Kota Bandar Lampung di Jl. Ikan Selar, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Senin 10 Juli 2023 yang diklaim sebagai pantai terkotor di Indonesia, merupakan langkah yang sangat penting dan layak diapresiasi. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di daerah pesisir yang rentan terhadap dampak negatif aktivitas manusia.



Pencemaran pantai dapat berdampak buruk terhadap ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Dalam pembahasan ini, dapat dikaji dampak lingkungan dan kesehatan yang mungkin timbul akibat kondisi pantai yang tercemar. Misalnya, kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, dan penyebaran penyakit.



Disela kegiatan, Wali Kota Eva Dwiana mengatakan, menjaga kebersihan pesisir pantai yang ada di kota bandar Lampung ini menjadi tanggung jawab bersama komunitas Pandawara serta Pemerintah Kota Bandar Lampung, Forkopimda dan seluruh masyarakat bergotong royong melakukan pembersihan bersama.



Dalam hal ini perlu ditekankan pentingnya edukasi dan kesadaran lingkungan dalam mencegah pencemaran pantai. Pendidikan lingkungan sejak dini, kampanye sosial, dan pelibatan masyarakat dalam program-program kebersihan dapat menjadi fokus perbincangan.

Sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan di Kota Tapis Berseri telah dilakukan. Program tersebut berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan.

Di Kota Bandar Lampung ada beberapa program kesehatan dan pendidikan gratis yang telah dilakukan dan berkelanjutan dilakukan. Program ini dapat mengurangi pengeluaran, sehingga berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan.

Sementara untuk program penanganan kemiskinan yang berdampak langsung yakni pemberian bantuan beras yang dibagikan melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Di pusat juga ada program BLT untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kita cukup optimis angka kemiskinan Bandar Lampung dapat ditekan menjadi 8 persen.

Program Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu program keluarga harapan (PKH), program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai tujuannya yang tepat objek dan tepat sasaran penerimanya, sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam menanggulangi angka kemiskinan, terdapat 34.444 dari total 76.553 rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Artinya, sebesar 44.99% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Agar bisa mendapat bantuan PKH ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, selain merupakan keluarga miskin, memiliki E-KTP, ada anggota keluarga di antara 7 komponen penerima PKH, juga harus terdaftar dalam DTKS Kemensos. Jika memenuhi syarat tersebut maka akan mendapat dana PKH dengan nominal yang berbeda di setiap kategorinya. Tujuh Kategori KPM PKH yaitu Ibu hamil, balita, Lansia, Difabel, anak sekolah Dasar (SD), anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap kategori mendapat dana berbeda-beda.



Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan dalam menekan angka stunting Tahun 2023, selain melakukan edukasi yang dilakukan oleh kader posyandu, pemerintah kota Bandar Lampung juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan mengalokasikan dana Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) milliar untuk asupan gizi bagi balita.



Program inovatif pelayanan kesehatan Kota Bandar Lampung, salah satunya program Ambulance Gratis. Program tersebut sudah ada sejak tahun 2011 yang merupakan program kesehatan, dan berkelanjutan hingga saat ini Tahun 2023. Dalam arahan Walikota meminta kepada para petugas team medis untuk terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan diantaranya cek kesehatan, antar jemput ke rumah sakit, dan antar jenazah. Bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan Ambulance Gratis ini bisa menghubungi call center 082278221400 yang langsung terhubung dengan petugas yang beroperasi 24 jam.

Program inovatif pelayanan kesehatan berupa kendaraan ambulans gratis ini, diperuntukkan untuk jemput-antar pasien darurat ke seluruh tempat pelayanan kesehatan di kota Bandar Lampung.

Adapun persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan pelayanan kendaraan ambulans gratis sangatlah mudah. Cukup dengan KTP serta kartu keluarga asli warga Kota Bandar Lampung. Tujuan kendaraan ambulans gratis tersebut untuk melayani pasien gawat darurat yang memerlukan penanganan cepat sehingga bisa mengurangi kasus kematian bagi pasien

Ambulans gratis ini juga siap melayani 24 jam jika masyarakat Kota Bandar Lampung membutuhkan pelayanan kesehatan secepatnya. Sepanjang 2022 pengguna layanan ambulans gratis pemkot Kota Bandar Lampung ini mencapai 5.006 orang. Namun angka lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni hingga 5.760 orang. Pasien sakit merupakan pengguna tertinggi ambulans gratis sepanjang 2022 yakni 3.509 pasien. Kemudian pasien laka lantas sebanyak 1.435 pasien, jenazah 44 mayat, dan 18 pasien melahirkan.



Praktik Baik rumah singgah gratis

Non Pemerintah rumah singgah siger



Palang Merah Indonesia (PMI) sediakan rumah singgah siger gratis bagi warga Lampung yang kesulitan mencari tempat tinggal saat berobat di Bandar Lampung. Rumah singgah siger merupakan layanan tanpa biaya untuk membantu masyarakat yang berobat di RSUD Abdul Moeloek. Lokasi rumah singgah ada di jalan kiwi nomor 27 Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung, tepatnya berada di samping kantor kelurahan kedaton.

Rumah singgah siger memiliki fasilitas diantaranya yaitu: ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi dan 5 kamar tidur. Bagi masyarakat Lampung yang ingin mendapat layanan gratis tempat tinggal, bisa mendatangi kantor PMI Provinsi Lampung atau langsung ke rumah singgah siger.

Rumah singgah siger dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan pasien yang menempati rumah singgah tersebut sudah sembuh dan diharapkan tidak tinggal lagi di rumah singgah.



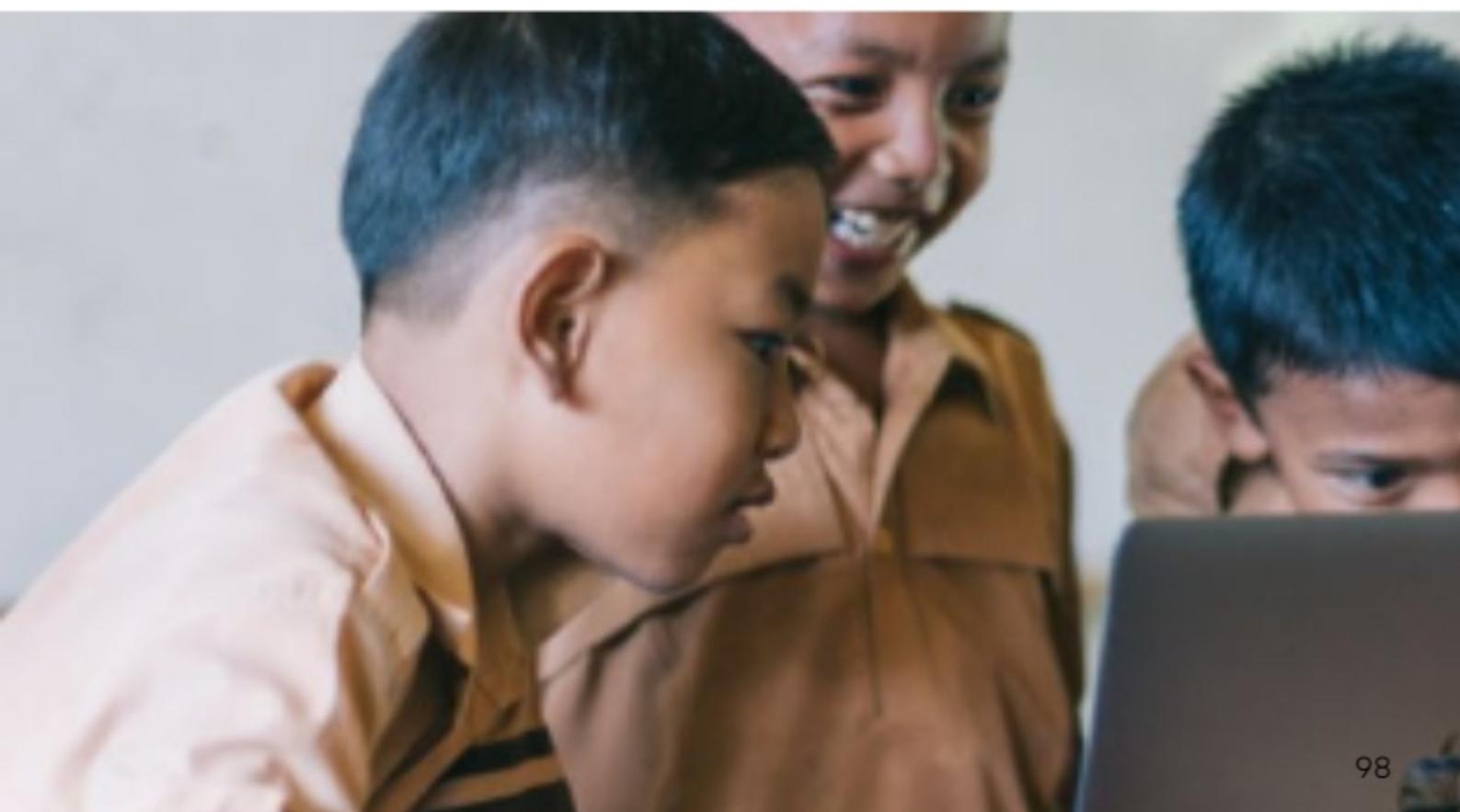
Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Pendidikan berkualitas

Tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan beasiswa kepada masyarakatnya yang berprestasi, dan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa yang lulus SMP dan akan melanjutkan ke SMA/SMK. Juga untuk warga Kota Bandar Lampung yang lulus SMA/SMK hendak masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Bahwa beasiswa tersebut diperuntukkan bagi peserta didik yang berprestasi secara akademik. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memilih peringkat lima besar di sekolah sebagai penerima. Kebijakan itu juga berlaku untuk beasiswa masuk PTN. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah bekerja sama dengan Universitas Negeri di Bandar Lampung untuk program tersebut.

Kemudian, dengan program ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap warga kota Bandar Lampung bisa merasakan pendidikan tinggi. Hal tersebut agar ke depan kualitas sumber daya manusia (SDM) di ibu kota Provinsi Lampung bisa lebih meningkat. Dengan beasiswa ini harapannya anak yang memiliki keinginan belajar bisa menggapai cita-citanya.

Kini Pemerintah Kota sedang melakukan strategi guna mengurangi angka putus sekolah. Diantaranya, Pemerintah Kota kini memberi atau memfasilitasi 1000 beasiswa untuk warga Bandar Lampung yang benar-benar membutuhkan dan kurang mampu.



Kota Bandar Lampung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, PAUD, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung juga Terdapat 46 perguruan tinggi dengan 6 Perguruan Tinggi Negeri dan 40 perguruan tinggi swasta, (19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 universitas).

Di awal tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, memperoleh kado indah yakni berupa penghargaan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung. Piagam penghargaan dari BPMP Lampung sudah diserahkan kepada Kepala Disdikbud Bandar Lampung.

Adapun penilaian dari capaian implementasi program dan kebijakan Merdeka Belajar, yakni Asesmen Nasional yang terdiri dari survei serta partisipasi lingkungan belajar, dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, terdiri dari pemanfaatan platform rapor pendidikan, profil pendidikan, rekomendasi perencanaan berbasis data, dan indikator kinerja urusan pendidikan. Kemudian, dari Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM), terdiri dari satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, strategi IKM, dan platform Merdeka Belajar.



Apresiasi diberikan Pemerintah kepada Guru Bahasa Lampung sebagai Pelopor Pelestari Bahasa Lampung. Prestasi yang telah diraih oleh para guru menandakan bahwa Bahasa Lampung memiliki potensi yang luar biasa dalam dunia pendidikan.

Ditengah pesatnya perkembangan teknologi yang mobilisasi, bahasa Lampung harus terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang berharga.



Para guru telah berperan sebagai agen perubahan dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pengajaran yang inovatif dan efektif. Penghargaan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong semangat koperasi dan kolaborasi diantara para pendidik. Prestasi ini merupakan titik tolak untuk terus berusaha lebih baik dan mengajak seluruh guru untuk terus berinovasi mengembangkan ilmu pembelajaran yang kreatif dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Bandar Lampung melakukan inovasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu dan Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi (SI-PANDU-SI-LAJIS) untuk menciptakan kemudahan pelayanan di bidang pendidikan dan inovasi serta kreativitas sekolah.



Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Kesetaraan gender

Wali Kota Bandar Lampung memberikan bantuan beasiswa ke anak berkebutuhan khusus atau difabel di Point of View Coffee di Jalan Tirtayasa, Sukabumi. Beasiswa tersebut diberikan kepada salah salah satu siswi SMAN 9 Bandar Lampung pengidap penyakit osteoporosis sekunder dan kelenjar parateroit. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan, pihaknya berjanji memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ke pelajar tersebut (lampungpro.co/post/47518/wali-kota-eva-dwiana-beri-beasiswa-ke-anak-berkebutuhan-khusus-di-bandar-lampung)

Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berencana akan membangun sekolah khusus di Bandar Lampung di daerah Kedaton. Nantinya seluruh fasilitas sekolah tersebut akan digratiskan oleh Wali Kota Bandar Lampung.

Program bantuan-bantuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus akan diprioritaskan dan dianggarkan pada APBD murni sehingga diharapkan anak-anak bisa mendapatkan apa yang didapat oleh anak-anak normal lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bandar Lampung mengungkapkan, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama di muka umum. Ia juga menjamin anak-anak penyandang disabilitas ini bisa mengakses fasilitas kesehatan dan berobat secara gratis di kota setempat.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah data yang menunjukkan IPG Tahun 2016 -2020

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

Tahun	IPG
2016	93,94
2017	93,53
2018	93,55
2019	93,96
2020	93,86

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2021



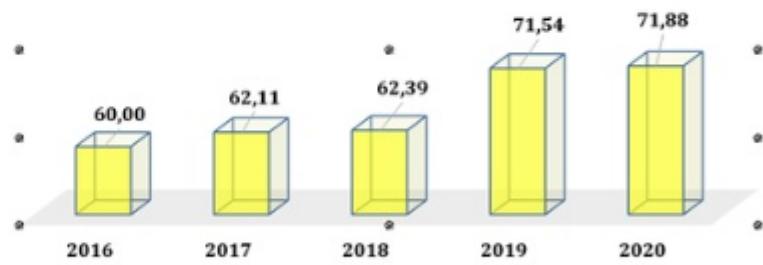
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Berikut adalah data yang menunjukkan IDG Tahun 2016-2020 :

Gambar 3.1 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020

Diagram 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020



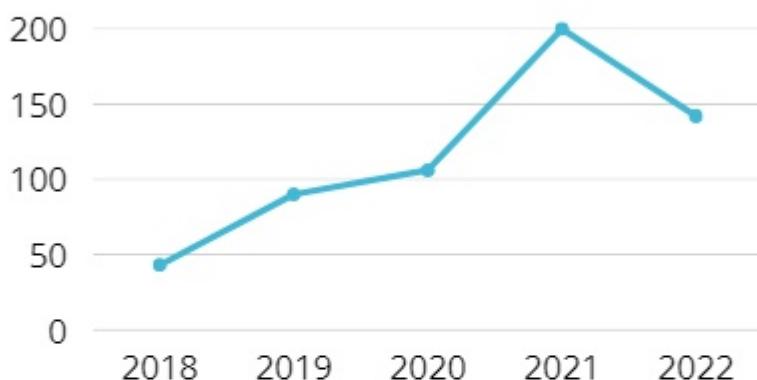
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berikut adalah data yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang tercatat melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Bandar Lampung.

Grafik 3.1 Kekerasan terhadap perempuan dan Anak



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2021

Tren kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung 5 (lima) Lima Tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2022 mengalami penurunan. Keberhasilan Kota Bandar Lampung dalam menekan angka kasus kekerasan tersebut merupakan kerja keras Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama stakeholder.

Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Air bersih dan Sanitasi layak

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen meningkatkan kesehatan masyarakat melalui sanitasi. Salah satu fokusnya yakni pengelolaan air limbah domestik. Hal tersebut melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Air Limbah Domestik dan Strategi Komunikasi Perubahan Prilaku Menuju Sanitasi Aman. Untuk mendukung program itu, dalam Perda nomor 7 itu setiap perumahan diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Hal itu sebagai solusi masalah ruang jika tidak bisa menyiapkan tanki septic pribadi. Di beberapa kelurahan sudah ada IPAL komunal seperti di Kota karang, kampung pelangi, dan Garuntang.



70 IPAL sudah disediakan dari tahun 2015, pembuatan IPAL tersebut dibantu hibah dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asian Development Bank (ADB). Bandar Lampung memiliki 1 IPLT besar di Kelurahan Bakung, menjadi tempat pembuangan dari penyedotan limbah cair dari masyarakat, tingkat sanitasi layak di Kota Bandar Lampung telah mencapai 95 persen. Sementara tingkat bebas BABS sudah menyentuh angka 92 persen.

Adapun tujuan pembuatan IPAL komunal adalah guna menciptakan lingkungan dan sanitasi yang sehat serta mencegah pencemaran air bawah tanah dari limbah rumah tangga (air cucian kamar mandi) maupun limbah kotoran manusia yang diharapkan dikelola dalam satu unit IPAL komunal, dan diharapkan dengan adanya IPAL kebersihan dan kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung akan meningkat.



Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung #Penanganan perubahan iklim

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) mengadakan Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung. Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim (RAI) merupakan serangkaian kegiatan pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Kelompok Kerja (Pokja) di sepuluh kota percontohan CRIC.



Pelatihan adaptasi ini berlangsung di Bandar Lampung terkait basis ilmiah, kerentanan dan risiko iklim diharapkan dapat menambah pengetahuan Tim Pokja sekaligus membantu kota untuk memproyeksikan perubahan iklim dengan menggunakan aplikasi SiBiaS dan Google Collab.



Rencana Aksi Iklim ini diharapkan dapat menjadi dasar dan panduan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan strategi dan instrumen aksi iklim di berbagai sektor prioritas secara terintegrasi



Kegiatan pelatihan ini didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) dan CCROM SEAP IPB melalui penyediaan tenaga ahli, pelatih dan perangkat. Pelatihan mitigasi ini didukung dengan penggunaan SIGN SMART (aplikasi perhitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca secara daring)



UCLG atau (*United Cities and Local Governments Asia-Pasific*) Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) mengenai Mitigasi Iklim yang merupakan Program dari CRIC (*Climate Resilient an Inclusive Cities*).

Pelatihan dan lokakarya terkait iklim telah dilakukan selama tahun 2020 dan Laporan Analisis Perkotaan dari 10 kota telah diselesaikan, baik versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Sektor prioritas untuk setiap kota juga dipilih dan disepakati tahun lalu.

Terkait dengan hal di atas, Proyek CRIC mendukung 10 kota percontohan untuk mengintegrasikan strategi perubahan iklim sesuai arahan dari RPJMN serta mengarusutamakan prioritas ketahanan iklim kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu upaya untuk mengidentifikasi prioritas ketahanan iklim kota adalah melalui penyusunan CAP.

Kota Bandar Lampung telah melaksanakan rangkaian Kegiatan Pelatihan CAP Adaptasi mulai dari tanggal September 2021 hingga Mei 2022. Pelatihan dan Pendampingan CAP pada isu mitigasi juga telah dimulai pada 3-7 Juni 2022 dengan materi Konsep Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pendampingan Pengumpulan. Namun setelah itu, kegiatan CAP tertunda sehingga perlu dilakukan kegiatan tambahan seperti Focus Group Discussion (FGD) dan melanjutkan pencarian data mitigasi perubahan iklim, sebelum dilakukannya Pelatihan Perhitungan Skenario Baseline dan Mitigasi (M2) pada Agustus 2023.



Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target yang tercantum dalam *National Determined Contribution* (NDC). Di dalam NDC, target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 diterjemahkan menjadi angka 834 juta ton CO₂e untuk seluruh sektor. Sektor energi mendapatkan porsi penurunan emisi sebesar 314 juta ton CO₂e.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui penurunan emisi yang telah dicapai. Pertama dengan mencari selisih antara baseline emisi GRK pada kondisi *Business as Usual* (BaU) dan hasil inventarisasi emisi pada kondisi sebenarnya. Selisih ini dianggap sebagai penurunan emisi dan dapat dihitung secara historis. Kedua dengan cara menghitung penurunan emisi dari setiap aksi mitigasi yang telah dilakukan

Untuk mengetahui penurunan emisi melalui cara pertama diperlukan inventarisasi data emisi yang lengkap dan akurat agar penurunan tersebut terukur dengan jelas. Data emisi yang lengkap diperoleh dengan cara menginventarisasi secara rutin terhadap seluruh data yang diperlukan untuk menghitung emisi. Data emisi yang akurat diperoleh melalui penggunaan metodologi yang tepat sesuai dengan panduan internasional



Dalam rangka mendukung hasil inventarisasi data emisi yang sesuai dengan harapan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional memberikan amanat kepada seluruh pimpinan untuk melakukan inventarisasi GRK sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya





Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung

BAB 4

Kesimpulan dan Saran.

Pada Bab ini diakhiri dengan penutup yang menyimpulkan secara keseluruhan kesimpulan dan saran yang telah disajikan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi SDGs dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki komitmen dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pencapaian TPB di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

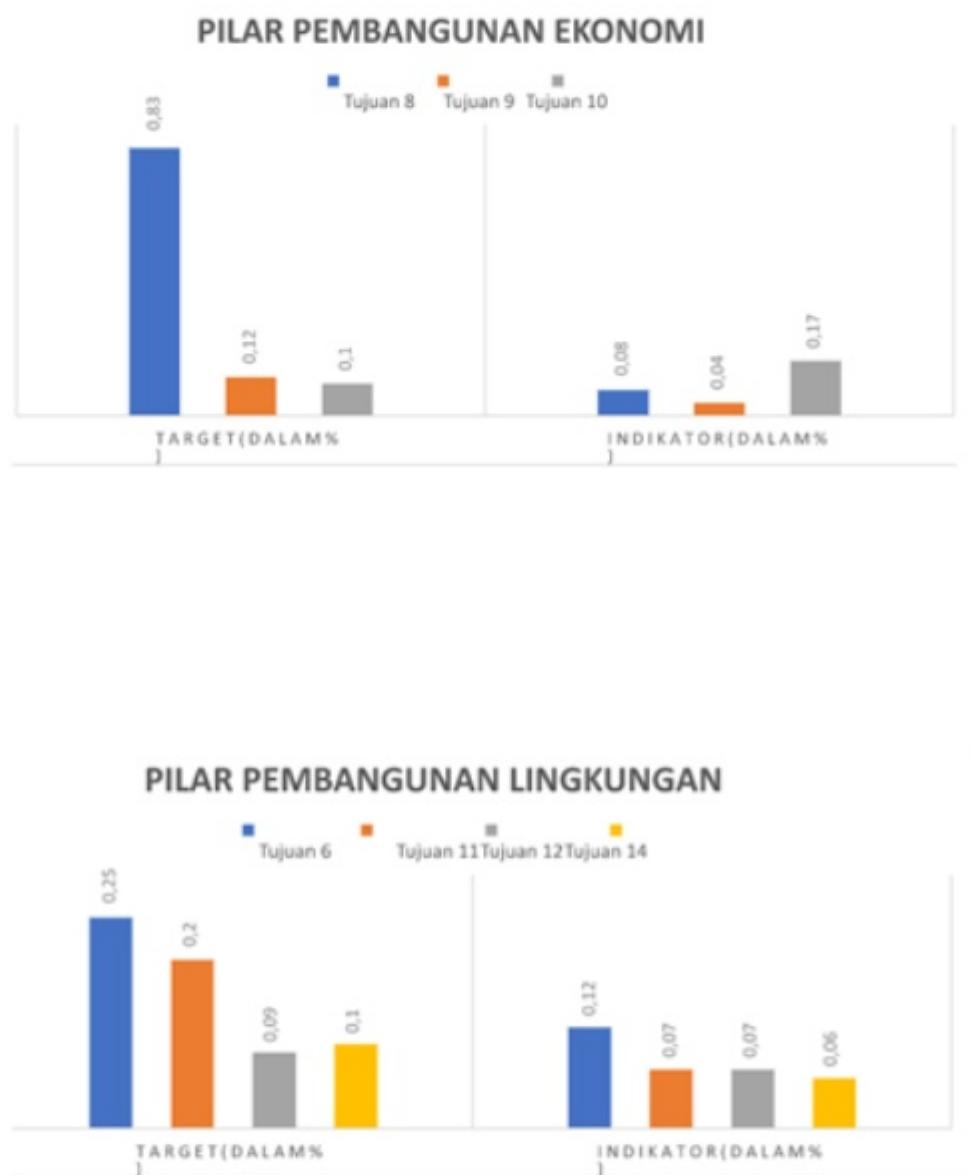
Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memastikan pencapaian TPB/SDGs dalam program dan kegiatan pembangunan terutama dalam Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 3, 4, 5), dan Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, dan 13).

Dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2023 ini telah berhasil mengidentifikasi komitmen Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap target dan indikator dari 6 TPB/SDGs. Perkembangan pelaksanaan TPB di Kota Bandar Lampung, dengan tren capaian dari 6 tujuan prioritas Kota Bandar Lampung telah menunjukkan adanya peningkatan. Dimulai dari pencapaian target dalam rangka tujuan penghapusan kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi dan penanggulangan perubahan iklim.

Gambar 4.1. Target dan Indikator Pilar Sosial pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung



KESIMPULAN



GAMBAR 4.2. TARGET DAN INDIKATOR PILAR LINGKUNGAN PADA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KESIMPULAN

4.2. Kesimpulan

Dari hasil di atas dapat disimpulkan juga bahwa 6 tujuan tersebut merupakan modal dasar untuk membuat prioritas dalam pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung. Tentunya sangat penting keselarasan antara target SDGs dan program kegiatan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah terkait agar tujuan SDGs dapat tercapai dengan baik. Juga indikator dan data-data yang harus dilengkapi untuk memperoleh indikator pun sudah jelas sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Adanya program dan kegiatan pada Perangkat Daerah tersebut juga menandakan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi program.

Sementara untuk target dan indikator pada tujuan-tujuan yang lain belum dapat diidentifikasi, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terhadap tujuan-tujuan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan karena kurang lengkapnya ketersediaan data yang didapatkan atau pun memang dikarenakan belum terakomodirnya target dan indikator dari tujuan-tujuan tersebut dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, atau memang target dan indikator yang ingin dicapai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat. Untuk itu ke depan akan ditingkatkan integrasi antar instansi daerah dan meningkatkan ketersediaan satu data (Big Data) di Kota Bandar Lampung guna menganalisis capaian tujuan TPB agar analisis terlaksana secara komprehensif.



SARAN

Dari kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran terkait dengan progress pencapaian TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung. Dokumen *Voluntary Local Review* (VLR) yang mengacu kepada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas diperlukan untuk mengukur langkah-langkah kongkrit yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs diperlukan suatu tool berupa dokumen yang up-to-date dan efektif dalam mendokumentasikan sekaligus mengkaji progress pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan kelengkapan data-data dari OPD baik yang berupa data dalam format Matriks dan maupun dokumen-dokumen perencanaan program dan kegiatan dari OPD dan lembaga terkait. Dengan begitu dokumen VLR TPB/SDGs yang akan disusun kembali di tahun-tahun mendatang dapat menjadi lebih representative dalam merekam progres TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung.

Diketahui juga bahwa tidak semua tujuan dapat terpetakan keterkaitannya dengan tupoksi OPD Kota Bandar Lampung pada dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung tahun 2023 ini sehingga perlu juga disarankan untuk meningkatkan keterkaitan target-target TPB/SDGs pada tupoksi dan rencana kerja seluruh OPD di Kota Bandar Lampung. Juga perlu adanya keseimbangan pada prioritas dan alokasi pembiayaan untuk pencapaian TPB/SDGs untuk bidang-bidang non fisik.





**Penyusun : Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos.,M.Si
Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA**

Designer dan Ilustator : Bidang Perekonomian Dan SDA

**Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penulis**

**BAPPEDA Kota Bandar Lampung
Alamat : Jl. Dr. Susilo Nomer 2 Bandar Lampung
Telp./WA. : 0721) 254984
Fax : 254984
Email : Bappeda@BandarLampung.go.id
Instagram : [Bappeda_BandarLampung](#)
Youtube : [Bappeda Kota Bandar Lampung](#)**



Tim Pendukung Data

Perencana Bappeda Kota Bandar Lampung
Pelaksana dan Staf Bidang Perekonomian dan SDA





**Bidang Perekonomian dan SDA
BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG**
